



PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER DINAS PENDIDIKAN



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

Dinas Pendidikan Kab. Jember

2025-2029



www.dispendik.jemberkab.go.id



disdikjember



Diknas Jember



diknasjember

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan Dinas Pendidikan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. Hadi Mulyono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I.....	8
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	10
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	17
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	17
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	17
2.1.2 Sumber daya Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	40
2.1.3 Kinerja pelayanan	49
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	60
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	63
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.....	65
2.2.2 Isu Strategis	69

BAB III	70
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	70
3.2 Strategi dan Kebijakan	80
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	83
BAB V PENUTUP	164
5.1 Kesimpulan Substansial.....	91
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	92
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia	40
Tabel 2.2 Proposi jumlah pegawai berdasarkan jabatan	41
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai NON ASN(PPT)per Per penempatan	42
Tabel: 2.4 Jumlah Tenaga Kependidikan	43
Tabel: 2.5 Jumlah Kualifikasi Akademik Pendidik.....	45
Tabel 2.6 Jumlah dan nilai Sarpas Dinas Pendidikan.....	46
Tabel 2.7 Sarana Satuan Pendidikan	48
Tabel TC23	58
Tabel TC24.....	59
Tabel TC25	78
Tabel 2.5 Jumlah Aset Yang Dimiliki	61
Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan dinas Pendidikan.....	66
Tabel 2.7 Faktor Pendorong dan penghambat pelayanan Dinas	67
Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan K/L	69
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan perangkatn daerah berdasarkan provinsi...	69
Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategi PD.....	70
Tabel TC26.....	82
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program.....	84
Tabel 4.3 Rencana Program	111
Tabel 4.4 Daftar sub kegiatan.....	136
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama.....	158
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 cascading Dinas Pendidikan	80
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan pendidikan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat

Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona VirusDisease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan

sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

pada Sub Bab ini memuat informasi tentang :

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada sub bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan:

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah;

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah;

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan

4.1 Uraian program;

4.2 Uraian kegiatan;

4.3 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 –

2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan tentang

5.1 Kesimpulan Substansial

5.2 Kaidah pelaksanaan

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Penyajian data – data dan informasi terkait melaksanakan urusan pendidikan di bidang pemerintahan sebagai mana tanggung jawab Dinas Pendidikan dengan capaian pelaksanaan urusan selama 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Data disajikan menyesuaikan dengan kebutuhan penggambaran dan informasi yang disajikan melalui tahapan pendekatan analisis tertentu yang update serta akurat. Pendekatan analisis dilakukan guna menghasilkan informasi data yang sesuai dengan output yang diharapkan.

Hasil evaluasi capaian tentang pelaksanaan urusan pendidikan tersebut berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pengumpulan data selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan harapan muncul analisis target pelayanan bidang urusan pendidikan di Pemerintahan yang selaras serta dapat menjadi sarana pengambilan kebijakan/keputusan yang lebih baik.

Proses evaluasi menggunakan proses terstruktur untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pencapaian pelaksanaan urusan bidang Pendidikan. Data dan informasi hasil proses evaluasi yang disajikan dalam bentuk table, grafik, dan gambar yang didalamnya terdapat narasi evaluasi terkait kesimpulan data yang ditampilkan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana pemerintahan di Bidang Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

disebutkan di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Dinas Pendidikan merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana ; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, terdiri atas :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. UPTD; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan

kegiatan Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang Pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah pendidikan; di bidang
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan
- c. administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
- d. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
- e. administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang
- g. milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor; dan pendistribusian
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana

prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya di Kabupaten Jember (bahasa jawa);
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.

- **Seksi Kurikulum dan Penilaian**

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan operasional peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;
- b. melakukan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan Sekolah Dasar;
- c. melaksanakan ujian semester dan ujian nasional pendidikan Sekolah Dasar;
- d. menyusun pedoman penulisan dan fasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan Sekolah Dasar;

- e. melakukan pembinaan dan pelestarian bahasa jawa;
- f. melakukan pengkoordinasian dan supervise pengembangan kurikulum Sekolah Dasar;
- g. melakukan pengkoordinasian pemahaman terhadap kurikulum melalui sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum pada jenjang Sekolah Dasar;
- h. menyusun rencana dan program kerja seksi kurikulum, rencana kerjathunan sertarencana penerapan, pemberlakuan dan pemahaman terhadap kurikulum pada jenjang Sekolah Dasar;
- i. menyusun kegiatan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang bermutu;
- j. menyusun kegiatan pelaksanaan ujian semester, ujian nasional;
- k. melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada jenjang Sekolah Dasar;
- l. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja guru pada jenjang Sekolah Dasar dan pengawas Sekolah Dasar secara periodik;
- m. melaksanakan pengendalian mutu pendidikan, Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Sekolah Dasar;
- n. mengkoordinasikan peningkatan mutu lulusan Sekolah Dasar serta menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya;
- o. menyusun program UKS, pendidikan ekstrakurikuler dan Standar Pelayanan Minimal pada Jenjang Sekolah Dasar; dan
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

- **Seksi Kelembagaan dan Sarana**

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Sekolah Dasar;
- b. menerapkan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan Sekolah Dasar;

- c. menyiapkan proses rekomendasi pendirian dan pencabutan izin kelembagaan sekolah dasar;
- d. melaksanakan pengelolaan bantuan operasional sekolah dasar;
- e. melaksanakan akreditasi kelembagaan sekolah dasar;
- f. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana prasarana sekolah dasar ;
- g. melaksanakan pendataan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana sekolah dasar;
- h. melakukan pengidentifikasian dan pengusulan bantuan sarana prasarana sekolah dasar;
- i. menyusun rencana kebutuhan sarana pendidikan, gedung, perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada sekolah dasar;
- j. menyusun rencana kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sekolah dasar;
- k. mengelola dana bantuan pendidikan untuk pendidikan anak Sekolah Dasar yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditentukan peruntukannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;
- l. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah untuk pendidikan Sekolah Dasar;
- m. penyusunan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pendayagunaan bantuan dalam pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana sekolah dasar;.
- n. pelaksanaan penggandaan naskah dan barang cetakan Pendidikan sekolah dasar;
- o. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan sekolah dasar, seperti: Buku, Alat Tulis, Alat Peraga Pendidikan, meubeler dan sarana pendukung lainnya;
- p. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung pendidikan sekolah dasar;
- q. pelaksanaan, pendataan dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kantin sekolah;

- r. menyusun usulan kebutuhan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kantin sekolah; dan
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

4. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

- **Seksi Kurikulum dan Penilaian**

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan operasional peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah menengah pertama;
- b. menyiapkan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan Sekolah menengah pertama;
- c. melaksanakan ujian semester dan ujian nasional pendidikan Sekolah menengah pertama;
- d. menyusun pedoman penulisan dan fasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan Sekolah Dasar menengah pertama;
- e. mengkoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum Sekolah menengah pertama;
- f. mengkoordinasikan pemahaman terhadap kurikulum melalui sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum pada jenjang Sekolah menengah pertama;
- g. menyusun rencana dan program kerja seksi kurikulum, rencana kerjatahunan serta rencana penerapan, pemberlakuan dan pemahaman terhadap kurikulum pada jenjang Sekolah menengah pertama;
- h. menyusun kegiatan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang bermutu;
- i. menyusun kegiatan pelaksanaan ujian semester, ujian nasional;
- j. menelaah, memantau dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada jenjang Sekolah menengah pertama;
- k. melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja guru pada jenjang Sekolah menengah pertama dan pengawas Sekolah menengah pertama secara periodik;
- l. melakukan pengendalian mutu pendidikan, Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Sekolah menengah pertama;
- m. mengkoordinasikan peningkatan mutu lulusan Sekolah

menengah pertama serta menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya;

- n. menyusun program UKS, pendidikan ekstrakurikuler dan Standar Pelayanan Minimal pada Jenjang Sekolah Dasar; dan
- o. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

- **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data sekolah, dan siswa-siswa Sekolah menengah pertama;
- b. merumuskan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah menengah pertama;
- c. melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Sekolah menengah pertama;
- d. menerapkan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan Sekolah menengah pertama;
- e. melaksanakan penyiapan proses rekomendasi pendirian dan pencabutan ijin kelembagaan sekolah menengah pertama;
- f. melaksanakan pengelolaan bantuan operasional sekolah menengah pertama dan;
- g. melaksanakan akreditasi kelembagaan sekolah menengah pertama;
- h. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- i. melaksanakan pendataan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- j. mengidentifikasi dan mengusulkan bantuan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- k. menyusun rencana kebutuhan sarana pendidikan, gedung, perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada sekolah menengah pertama;

- l. menyusun rencana kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sekolah menengah pertama;
- m. mengelola dana bantuan pendidikan untuk pendidikan anak Sekolah Menengah Pertama yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditentukan peruntukannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;
- n. melakukan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- o. menyusun teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pendayagunaan bantuan dalam pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- p. melaksanakan penggandaan naskah dan barang cetakan Pendidikan sekolah menengah pertama;
- q. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan sekolah menengah pertama, seperti: Buku, Alat Tulis, Alat Peraga Pendidikan, meubeler dan sarana pendukung lainnya;
- r. melaksanakan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung pendidikan sekolah menengah pertama;
- s. melaksanakan pendataan dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kantin sekolah;
- t. menyusun usulan kebutuhan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kantin sekolah; dan
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

5. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, serta melaksanakan tugas-lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

- **Seksi Kurikulum dan Penilaian**

Seksi Kurikulum dan penilaian mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan operasional peningkatan mutu dan penyelenggaraan PAUD;

- b. melaksanakan penyusunan rumusan standar kriteria, pedoman, dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar PAUD;
- c. melaksanakan kegiatan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum PAUD;
- d. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan;
- e. melaksanakan supervisi pengembangan kurikulum PAUD;
- f. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan sosialisasi kurikulum PAUD;
- g. melakukan pemantauan implementasi dan kurikulum PAUD;
- h. menelaah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada PAUD dan pendidikan nonformal;
- i. melaksanakan sosialisasi implementasi standar penyelenggaraan PAUD:
- j. melaksanakan peningkatan angka partisipasi PAUD melalui peningkatan mutu penyelenggaraan PAUD dan pendidikan masyarakat;
- k. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini;
- l. melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan/UNPK) serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan lainnya;
- m. melaksanakan peningkatan pendidikan kesetaraan (paket A setara SD, paket B setara SMP), pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan yang bermutu dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

- **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data sekolah, dan siswa-siswa PAUD;
- b. merumuskan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) PAUD;
- c. melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang PAUD;
- d. menerapkan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan PAUD;
- e. melaksanakan peningkatan pemberdayaan Forum PAUD, GOPTKI, HIMPAUDI dan IGTKI;
- f. menyiapkan bahan untuk proses rekomendasi pendirian dan pencabutan ijin kelembagaan PAUD;
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan bantuan operasional PAUD;
- h. melaksanakan akreditasi kelembagaan PAUD;
- i. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana prasarana pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. melaksanakan pendataan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- k. melakukan indentifikasi kebutuhan dan pengusulan bantuan sarana prasarana pendidikan, gedung, perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada Pendidikan Anak Usia Dini;
- l. menyusun rencana kebutuhan sarana pendidikan, gedung, perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada Pendidikan Anak Usia Dini;
- m. menyusun rencana kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- n. melaksanakan pengelolaan dana bantuan pendidikan untuk pendidikan anak usia dini yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditentukan peruntukannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;

- o. melakukan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah untuk pendidikan Anak Usia Dini;
- p. menyusun teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pendayagunaan bantuan dalam pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- q. melaksanakan penggandaan naskah dan barang cetakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- r. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan kursus dan pelatihan, dan sarana pendidikan keluarga;
- s. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan anak usia dini, seperti : Buku, Alat Tulis, Alat Peraga Edukatif (APE), dan sarana pendukung lainnya;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- u. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten jember;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal; dan
- g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

- **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar**

Seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian perumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian formasi data bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar,
- c. melaksanakan urusan kependidikan sekolah dasar; kepegawaian pendidik dan tenaga
- d. melaksanakan analisis dan penyusunan pemetaan, pemerataan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar,
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- f. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi personal, sosial, profesional dan pedagogik pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- g. melakukan pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional

- pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- h. melakukan pembinaan dan pengembangan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - i. menyusun data, verifikasi dan penyajian data calon penerima bantuan guru sekolah dasar
 - j. melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang pelayanan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar tingkat daerah, nasional dan international;
 - k. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - l. mengembangkan inovasi layanan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - m. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - n. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - o. melaksanakan peningkatan kompetensi guru melalui system pembinaan profesional guru yang berkaitan dengan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar;
 - p. melaksanakan analisis dan proyeksi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - q. melaksanakan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar berprestasi melalui uji kompetensi;
 - r. melakukan perencanaan penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - s. melaksanakan proses ijin belajar pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan;

- t. melaksanakan proses pengadaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kartu identitas lain bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - u. menyusun bahan penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - v. melakukan penilaian angka kredit (PAK), usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - w. melaksanakan proses penilaian portofolio/plpg/ppg/pspg sebagai uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dan pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) dan sertifikasi guru sekolah dasar;
 - x. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan
 - y. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama**
 Seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengkajian perumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian formasi data bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah Pertama;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - d. melaksanakan analisis dan penyusunan pemetaan, pemerataan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - e. melakukan pembinaan dan mengembangkan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

- f. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan kompetensi personal, sosial, profesional dan pedagogik pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- g. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan karir jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- h. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- i. menyusun data, verifikasi dan penyajian data calon penerima bantuan guru sekolah menengah;
- j. melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang pelayanan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama tingkat daerah, nasional dan internasional;
- k. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- l. mengembangkan inovasi layanan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- m. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- n. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- o. melaksanakan peningkatan kompetensi guru melalui system pembinaan profesional guru yang berkaitan dengan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- p. melaksanakan analisis dan proyeksi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- q. melaksanakan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan sekolah menengah pertama berprestasi melalui uji kompetensi;

- r. melakukan perencanaan penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- s. melaksanakan proses ijin belajar pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan;
- t. melaksanakan proses pengadaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kartu identitas lain bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- u. menyusun bahan penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- v. melakukan penilaian angka kredit (PAK), usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- w. melaksanakan proses penilaian portofolio/plpg/ppg/pspg sebagai uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dan pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) dan sertifikasi gurusekolah menengah pertama;
- x. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
- y. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- z. UPTD
 - a. UPTD merupakan Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.
 - b. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - c. UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala

Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- e. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator ditetapkan oleh Bupati.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Pendidikan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.1.2 Sumber daya Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki PD untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan memiliki sumber daya antara lain sumber daya manusia (pegawai) dan asset / modal.

Pelaksanaan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sesuai struktur organisasi terdiri dari 16 (enam belas) orang PNS*). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebanyak XVI Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 (satu) Orang
2. Eslon III : 3 (tiga) Orang
3. Eslon IV : 1 (satu) Orang
4. Pejabat fungsional : 5 (lima) Orang
5. Staf/Non Eslon : 6 (enam) Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebanyak XVI orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 4 (empat) Orang
2. Sarjana S-1 : 6 (enam) Orang
3. Diploma -3 : 1 (satu) Orang

4. SLTA : 4 (empat) Orang
5. SLTP : -
6. SD : -

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Sampai akhir Desember 2021, Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, berjumlah 117 orang. Berikut ini jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan dan berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana.

Tabel: 2. 1 Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	GOL/ Ruang	TINGKAT PENDIDIKAN										JUMLAH	PROSEN
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMA	SMP	SD		
1	IV c		3	1								4	10
2	IV b			3								3	7.5
3	IV a			3								3	7.5
4	III d			12								12	30
5	III c			9								9	22.5
6	III B			1								1	2.5
7	III a												
8	II d				1			1				2	5
9	II c							2				2	5
10	II b							1	3			4	10
11	II a												
12	I d												
Jml ASN			3	29	1			4	3			40	100
% ASN			9.2	59.1	13.6			13.6			4.4		
13	THL/ Non ASN	0	0	16	6	1	3	5	18	1	1	51	100

% THL/ Non ASN	0	0	30.7	11.5	1.9	5.55	11.5	34.6	1.9	1.9	100	100
Jml ASN + Non ASN	0	3	45	7	1	3	10	21	1	1	91	100
% ASN + Non ASN		3.3	49.4	7.7	1.1	3.3	10.10	23.1	1.1	1.1		

Tabel: 2.2 Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH		KETERANGAN
	STRUKTURAL			
1	KEPALA DINAS	1		Orang
2	SEKRETARIS	1		Orang
3	KEPALA BIDANG	4		Orang
4	KEPALA SUBAG	3		Orang
5	KEPALA SEKSI	8		Orang
	FUNGSIONAL			
1	PENGAWAS	19		Orang
2	PENILIK	19		Orang
	PELAKSANA			
1	STAF/PEGAWAI	90		Orang
	JUMLAH	145		Orang

Tabel: 2.3 Jumlah Pegawai Non ASN (PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas sertaper Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN DINAS PENDIDIKAN KAB. JEMBER						
NO.	PENEMPATAN	SAT	JUMLAH	PENDIDIKAN		
				S1/D3	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	32	10	21	1
2	BIDANG PEMBINAAN SD	Orang	5	3	2	-
3	BIDANG PEMBINAAN SMP	Orang	5	4	1	-
4	BIDANG PAUD/PNF	Orang	4	3	1	-
5	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	Orang	7	2	5	-
	TOTAL NON ASN	Orang	53	22	30	1
	Persentase		100%			

Total Pegawai Non ASN Sebanyak 53 Orang, Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Dinas Pendidikan belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD

sebesar 00,00%, SLTA sebesar 00,00%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 00,00%, untuk pegawai Non ASN 00,00% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/workshop sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun jumlah tenaga kependidikan dan kualifikasi pendidik sebagaimana termasuk dalam satuan pelayanan unsur pendidikan Kabupaten Jember yang ada dalam tabel berikut:

Tabel: 2.4 Jumlah Tenaga Kependidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jabatan PTK	Jumlah
1	TK	Tenaga Administrasi Sekolah	92
2	SD	Tenaga Administrasi Sekolah	633
		Penjaga Sekolah	516
		Pustakawan	68
		Pesuruh/Office Boy	44
		Tukang Kebun	21
		Petugas Keamanan	12
3	SMP	Tenaga Administrasi Sekolah	555
		Pesuruh/Office Boy	56
		Penjaga Sekolah	54
		Tukang Kebun	31
		Pustakawan	25
		Petugas Keamanan	17
		Laboran	6
4	SPS	Tenaga Administrasi Sekolah	4
5	TPA	Tenaga Administrasi Sekolah	6
6	KB	Tenaga Administrasi Sekolah	60
		Instruktur	1
7	PKBM	Tenaga Administrasi Sekolah	11
		Instruktur	1

Berdasarkan tabel yang disajikan, jumlah tenaga kependidikan di Kabupaten Jember menunjukkan distribusi yang beragam di berbagai jenjang pendidikan. Tenaga Administrasi Sekolah menjadi jabatan dengan

jumlah paling dominan, tersebar di semua jenjang mulai dari TK hingga PKBM. Jenjang SD memiliki jumlah tenaga administrasi sekolah terbanyak, yaitu 633 orang, diikuti oleh SMP dengan 555 orang, dan TK dengan 92 orang.

Selain tenaga administrasi, terdapat juga berbagai jabatan lain yang mendukung operasional sekolah. Untuk jenjang SD, terdapat 516 penjaga sekolah dan 68 pustakawan, yang menunjukkan pentingnya peran mereka dalam mendukung operasional sekolah dan mengelola sumber bahan belajar siswa yakni perpustakaan. Sementara itu, jenjang SMP memiliki 54 penjaga sekolah, 25 pustakawan, dan 6 laboran, yang menunjukkan adanya fokus pada dukungan teknis dan operasional untuk kegiatan laboratorium. Perbedaan jumlah dan jenis jabatan ini mencerminkan kebutuhan spesifik pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Jember.

Ditampilkan pula Jumlah Kualifikasi Akademik Pendidik di Kabupaten Jember, disajikan pada tabel berikut:

Tabel: 2.5 Jumlah Kualifikasi Akademik Pendidik

No.	Jenjang	Ijazah									
		SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
1	TK	14	26	623	8	44	17	11	2919	25	0
2	KB	18	73	772	8	10	20	2	538	11	0
3	SPS	14	67	582	7	5	12	0	282	3	0
4	TPA	4	2	19	0	0	2	0	21	1	0
5	PKBM	5	2	49	0	2	7	1	100	2	1
6	SD	24	7	239	3	110	12	3	8093	212	2
7	SMP	33	9	142	9	18	16	12	4231	222	4

Rangkuman data kualifikasi akademik pendidik di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa mayoritas pendidik telah memiliki gelar sarjana (S1). Jenjang SD mendominasi jumlah pendidik berijazah S1 dengan angka mencapai 8.093 orang, diikuti oleh SMP dengan 4.231 orang, dan TK dengan 2.919 orang. Terdapat sejumlah pendidik dengan kualifikasi di bawah sarjana, seperti lulusan SMA/Sederajat yang banyak ditemukan di jenjang TK (623 orang) dan KB (772 orang). Kualifikasi diploma (D1-D4) juga tersebar di berbagai jenjang, seperti D2 yang cukup signifikan di SD sebanyak 110 orang dan TK sebanyak 44 orang. Hal ini menunjukkan adanya disparitas kualifikasi akademik antar jenjang pendidikan. Perbedaan jumlah kualifikasi Akademik Pendidik tidak menjadi penghambat Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Jember. Dukungan program Pemerintah Kabupaten Jember “Jember Maju, Jember Baru” yakni beasiswa guru atau tenaga kependidikan .

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.6 Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Per 1 Januari 2023

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit/ Paket	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp)
1	KIB A	TANAH	-	M2	1.029	186.936.598.849,00
2	KIB B	PERALATAN DAN MESIN	Unit	Buah/Barang	181.466	310.334.174.889,09
3	KIB C	GEDUNG DAN BANUGUNA N	Unit	M2	7.807	883.832.476.432,08
4	KID D	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-	M2	30	29.326.500,00
5	KID E	ASET TETAP LAINNYA	-	M2	3.450.218	170.963.797.818,51
6	KID F	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	M2	26	65.280.567,00
Jumlah Nilai Aset Tetap			-	-	-	1.552.161.655.055,69

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Pendidikan Kabupaten Jember per 1 Desember 2021 sebesar Rp. 1.552.161.655.055,69 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Sembilan Rupiah).

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

Tabel 2.7 Sarana Satuan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Ruang Perpus	Jumlah Lab Komputer	Jumlah Lab Bahasa	Jumlah Lab IPA	Jumlah Lab Fisika	Jumlah Lab Biologi	Jumlah Ruang KepSek	Jumlah Ruang Guru	Jumlah Ruang TU
1	PAUD	4185	65	1	0	0	0	0	604	1103	26
2	SD	7768	747	228	7	62	0	0	784	1036	136
3	SMP	2904	292	222	40	207	2	4	292	368	231
4	PKBM	127	7	0	0	0	0	0	11	24	3

Kabupaten Jember memiliki ribuan ruang kelas, dengan jenjang SD memiliki jumlah terbanyak mencapai 7.768 ruang, diikuti oleh PAUD dengan 4.185 ruang kelas. Untuk sarana pendukung lainnya, sarana satuan Pendidikan di Jember juga dilengkapi dengan ruang perpustakaan, laboratorium komputer, serta ruang kepala sekolah dan guru. Jumlah total ruang kepala sekolah dan guru yang cukup signifikan, menunjukkan adanya infrastruktur yang memadai untuk staf pengajar dan manajemen sekolah. Fasilitas seperti laboratorium IPA, Fisika, dan Biologi umumnya ditemukan di jenjang SMP, menunjukkan fokus pada pendidikan sains di tingkat tersebut. Dengan demikian, sarana pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium komputer, dan ruang perpustakaan menjadi sarana yang sangat penting dalam pendidikan Kabupaten Jember, karena dapat menunjang proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan (Dinas Pendidikan /termasuk capaian SPM)

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Pendidikan				0,57	0,58	0,59	0,6	0,61										
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)				13,44	13,45	13,5	13,72	13,86	13,44	13,49	13,49			0,00%	0,04%	0,03%		
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)				6,50	6,60	6,93	6,96	7,03	6,50	6,52	6,52			0,00%	0,00%	0,00%		

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menunjukkan peningkatan signifikan dalam indeks pendidikan, angka harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah selama periode 2022-2025. Peningkatan ini berhasil dicapai karena adanya kolaborasi efektif dengan berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Selain itu, inovasi dalam penggunaan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor kunci dalam mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya melampaui 100%.

Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-						Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	-2022	-2023	(2024)				-2022	-2023	-2024			-2022	-2023	-2024			Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	779.214.825.515	806.029.358.773	880.173.720.219				752.411.849.744	772.321.533.847	789.495.616.570			97	96	90			6,32%	2,43%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.366.081.700	3.865.793.500	7.434.639.734				1.067.875.829	3.498.234.600	6.359.597.909			78	90	86			137,65%	154,69%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	834.960.650	813.871.200	2.790.119.437				780.030.424	785.981.500	2.247.568.694			93	97	81			120,15%	93,36%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	531.121.050	101.694.400	451.906.400				287.845.405	91.550.000	427.100.000			54	90	95			131,76%	149,16%
Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	206.000.000	-				-	187.500.000	-			-	91	-			0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	350.980.000	2.674.745.000				-	324.715.000	2.619.022.500			-	93	98			381,04%	403,28%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.393.247.900	1.517.868.897				-	2.108.488.100	1.065.906.715			-	88	70			31,71%	25,28%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	775.195.733.541	796.231.858.304	866.941.145.550				749.477.906.224	763.683.818.544	779.132.854.589			97	96	90			5,80%	1,96%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	684.172.381.652	787.259.569.406	866.317.457.550				660.076.616.934	755.788.077.644	778.717.109.589			96	96	90			12,55%	8,77%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.023.351.889	8.972.288.898	623.688.000				89.401.289.290	7.895.740.900	415.745.000			98	88	67			-91,60%	-92,95%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	231.208.630	434.160.000	609.563.000				192.317.147	259.865.000	243.238.000			83	60	40			64,09%	14,36%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	231.208.630	434.160.000	609.563.000				192.317.147	259.865.000	243.238.000			83	60	40			64,09%	14,36%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.044.348.320	2.986.513.827	2.529.750.800				709.985.550	2.717.109.869	2.043.576.428			68	91	81			85,34%	128,96%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.045.090	100.000.000	43.300.800				20.054.700	98.609.498	20.043.000			95	99	46			159,24%	156,01%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.578.070	1.027.017.840	1.701.556.300				192.416.100	976.023.700	1.294.702.400			94	95	76			233,85%	219,95%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	263.675.760	449.596.200	195.754.800				214.789.000	431.083.888	143.397.500			81	96	73			7,03%	16,98%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.379.400	131.301.787	240.594.900				33.560.850	125.025.000	237.871.700			98	95	99			182,58%	181,40%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	-	-				-	-	-			-	-	-			-50,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.570.000	1.278.598.000	348.544.000				249.164.900	1.086.367.783	347.561.828			49	85	100			38,35%	134,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.107.824	549.093.135	514.943.135				245.990.328	507.120.953	480.143.678			78	92	93			34,30%	50,42%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.910.000	8.919.000	8.919.000				2.800.000	1.100.000	2.850.000			31	12	32			0,05%	49,19%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.197.824	540.174.135	506.024.135				243.190.328	506.020.953	477.293.678			80	94	94			35,33%	51,20%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.345.500	1.961.940.007	2.143.678.000				717.774.666	1.655.384.881	1.236.205.966			68	84	58			46,88%	52,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.530.400	47.688.800	65.668.000				40.960.354	47.612.526	46.132.862			63	100	70			5,80%	6,57%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	547.555.100	266.786.600	447.450.000				312.118.459	242.607.698	232.410.106			57	91	52			8,22%	-13,24%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.000.000	407.939.200	280.000.000				138.905.280	406.600.357	277.799.998			92	100	99			69,40%	80,52%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.260.000	1.239.525.407	1.350.560.000				225.790.573	958.564.300	679.863.000			75	77	50			160,89%	147,73%
PROGRAM PENGLOLAAN PENDIDIKAN	420.288.619.297	436.910.108.996	444.018.972.747				361.022.216.492	423.065.352.636	414.583.747.479			86	97	93			2,79%	7,59%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.000.922.213	204.184.476.946	204.231.835.847				185.519.078.452	200.926.767.677	200.476.995.967			89	98	98			-0,91%	4,04%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	454.156.000	340.267.289				-	440.864.130	300.702.000			-	97	88			37,46%	34,10%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	378.995.002	748.386.000	1.805.646.422				378.000.000	693.685.070	1.592.868.218			100	93	88			119,37%	106,57%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	866.896.000	851.870.000				-	785.857.000	755.664.000			-	91	89			49,13%	48,08%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	448.995.001	2.014.369.500	2.170.018.017				447.695.000	1.714.975.555	1.990.511.800			100	85	92			178,18%	149,57%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	236.031.000	63.298.000				-	150.337.650	54.052.000			-	64	85			13,41%	17,98%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	130.034.000	174.374.000				-	68.938.300	150.789.000			-	53	86			67,05%	109,37%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	19.468.721.252	2.554.200.000	4.624.561.830				19.320.143.560	2.459.772.000	4.576.300.200			99	96	99			-2,91%	-0,61%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	253.381.448	224.804.400	-				228.272.250	83.915.000	-			90	37	-			-55,64%	-81,62%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	174.580.700	140.751.300	342.553.300				172.698.014	64.813.000	301.260.181			99	46	88			62,00%	151,17%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	15.937.370.000	15.462.220.800	15.254.480.000				15.005.042.640	15.020.220.000	14.917.480.000			94	97	98			-2,16%	-0,29%

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	163.068.169.690	162.889.160.000	159.456.000.000			141.807.355.025	162.807.989.675	159.415.551.968			87	100	100			-1,11%	6,36%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	160.452.120	48.328.000	48.256.800			145.283.036	41.430.000	30.102.000			91	86	62			-35,01%	-49,41%
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.376.985.000	3.793.248.000	6.084.159.289			2.370.915.000	3.392.957.645	5.003.327.000			100	89	82			59,99%	45,28%
Pembiayaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	0	234.436.500			-	0	199.000.000			-	-	85			50,00%	50,00%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	0	231.708.800			-	0	28.800.000			-	-	12			50,00%	50,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.912.087.000	1.919.670.400	1.410.599.600			3.842.086.133	1.471.549.120	1.301.886.000			98	77	92			-38,72%	-36,61%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	80.589.000	103.878.000			-	79.085.000	88.373.000			-	98	85			64,45%	55,87%
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	188.420.000	358.442.000			-	99.900.000	347.000.000			-	53	97			95,12%	173,67%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	57.532.500	42.050.000	153.770.000			52.229.700	32.675.000	84.420.000			91	78	55			119,39%	60,46%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.763.652.500	12.391.162.546	10.523.516.000			1.749.358.094	11.517.803.532	9.338.908.600			99	93	89			293,76%	269,74%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	140.496.965.410	159.846.240.200	157.856.286.700			104.026.144.719	150.272.131.459	137.706.968.762			74	94	87			6,26%	18,05%
Pembangunan Laboratorium	2.350.517.400	11.846.944.000	11.846.944.000			2.248.650.050	10.529.004.300	4.348.635.590			96	89	37			202,01%	154,77%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.217.655.000	7.296.634.000	2.715.435.000			3.208.013.000	6.690.307.900	1.957.283.000			100	92	72			31,99%	18,90%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	6.966.783.500	9.554.980.000			-	5.938.987.750	8.294.108.050			-	85	87			68,58%	69,83%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	245.000.000	470.000.000			-	220.381.000	409.286.000			-	98	87			95,92%	92,61%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	-	825.000.000	658.500.000			-	625.112.700	579.442.000			-	76	88			99,91%	46,35%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.128.586.200	857.812.000	6.011.979.300			4.123.816.200	857.165.000	5.719.150.000			100	100	95			260,81%	244,00%
Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	496.871.720	588.016.000	-			483.791.680	353.180.000	-			97	66	-			-40,83%	-63,50%
Pembiayaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	44.392.407.750	42.930.271.100	36.592.065.000			43.098.617.740	37.367.203.000	26.935.815.000			97	87	74			-9,03%	-20,61%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	85.420.770.470	86.261.060.000	85.602.360.000			50.393.902.909	86.146.542.809	85.594.710.122			59	100	100			0,11%	35,15%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	80.229.170	46.900.000	46.835.000			66.501.540	45.500.000	41.048.000			83	97	88			-20,84%	-20,68%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi & Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	0	636.973.000			-	0	557.890.000			-	-	88			50,00%	50,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	96.427.700	46.900.000	46.900.000			89.481.600	25.350.000	45.500.000			93	54	97			-25,68%	3,91%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	313.500.000	1.696.330.400	3.638.600.000			313.410.000	1.247.822.000	3.191.086.000			100	74	88			377,80%	226,94%
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	238.589.200	34.715.400			-	224.975.000	33.015.000			-	94	95			7,28%	7,34%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	69.802.545.124	68.671.354.250	79.077.060.200			69.515.893.821	67.965.021.500	74.208.079.800			100	99	94			6,77%	3,48%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.218.212.010	611.177.150	217.458.200			3.213.527.000	483.964.500	165.803.800			100	79	76			-72,71%	-75,34%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	512.697.120	-	-			483.104.320	-	-			94	-	-			-50,00%	-50,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	-	1.158.560.000	652.130.000			-	975.651.000	536.404.000			-	84	82			28,14%	27,49%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.074.329.680	112.881.100	80.000.000			1.072.807.000	108.600.000	79.454.800			100	96	99			-59,11%	-58,16%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	73.151.700	-	-			50.821.000	-	-			69	-	-			-50,00%	-50,00%
Penyediaan Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	22.890.011.664	24.035.888.000	35.244.480.000			21.373.938.800	23.730.814.000	31.053.884.000			93	99	88			25,82%	20,94%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	42.000.000.000	42.702.848.000	42.707.992.000			43.297.226.000	42.616.992.000	42.199.533.200			103	100	99			0,84%	-1,28%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	34.143.000	-	-			24.469.701	-	-			72	-	-			-50,00%	-50,00%
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0	50.000.000	175.000.000			0	49.000.000	175.000.000			-	98	99			175,00%	176,53%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.988.186.550	4.208.037.600	2.853.790.000			1.961.099.500	3.901.432.000	2.191.702.950			99	93	77			39,73%	27,56%
Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	163.600.000	-			0	130.737.500	-			-	80	#DIV/0!			0,00%	0,00%
Pembiayaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	0	853.250.000			0	0	699.622.950			-	-	82			50,00%	50,00%
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.888.400.000	2.307.940.000	1.742.540.000			1.886.600.000	2.389.190.650	1.483.680.000			100	104	85			-1,14%	-5,63%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	42.133.950	-	-			19.219.500	-	-			46	-	-			-50,00%	-50,00%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi & Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	258.000.000			0	0	8.400.000			-	-	3			50,00%	50,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	1.586.497.600	-			0	1.234.503.850	-			-	78	-			0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	57.652.600	150.000.000	-			55.280.000	147.000.000	-			96	98	-			30,09%	32,96%
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	103.513.600	-	-			101.638.152	-	-			98	-	-			-50,00%	-50,00%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	103.513.600	-	-			101.638.152	-	-			98	-	-			-50,00%	-50,00%
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	103.513.600	-	-			101.638.152	-	-			98	-	-			-50,00%	-50,00%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	225.109.590	80.545.725.418	93.872.025.100			174.724.118	77.381.297.669	77.185.341.870			78	96	82			17848,61%	22093,72%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	225.109.590	80.545.725.418	93.872.025.100			174.724.118	77.381.297.669	77.185.341.870			78	96	82			17848,61%	22093,72%
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	185.467.050	353.156.500	413.465.200			137.333.700	345.633.100	58.198.000			74	98	14			53,75%	34,26%
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	39.642.540	80.192.568.918	93.458.559.900			37.390.418	77.035.664.569	77.127.143.870			94	96	83			101102,86%	102965,31%
Jumlah Total	1.199.832.068.002	1.323.485.193.187	1.418.064.718.066			1.113.710.428.506	1.272.768.184.152	1.281.264.705.919			93	96	90			8,73%	7,47%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melakukan penempatan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan yang diselenggarakan tepat guna, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan mencakup **anak usia dini, peserta didik jenjang pendidikan SD-SMP, guru, dan tenaga kependidikan.**

Berdasarkan karakteristik demografis, kondisi sosial, serta tantangan sektoral pendidikan, kelompok sasaran utama layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember meliputi:

- a) Peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SMP (negeri dan swasta), yang menjadi pusat perhatian utama dalam peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan hak pendidikan, penguatan karakter, serta perlindungan dan kesejahteraan anak di lingkungan sekolah.
- b) Pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk guru, kepala sekolah, dan staf pendukung di satuan pendidikan, yang membutuhkan peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, insentif kesejahteraan, serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, khususnya bagi pendidik di daerah terpencil dan sekolah swasta.
- c) Orang tua dan keluarga peserta didik, sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter, yang membutuhkan edukasi, komunikasi aktif, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah.
- d) Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal, seperti PKBM dan lembaga kursus, yang memerlukan pembinaan, fasilitasi operasional, dan penguatan tata kelola agar mampu menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama bagi warga belajar di luar sistem sekolah formal.
- e) Anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban 31 kekerasan, serta anak putus sekolah, yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis inklusi sosial.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berkomitmen menyusun strategi pelayanan pendidikan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring perkembangan teknologi informasi,

transformasi kurikulum, serta dinamika sosial masyarakat untuk menjamin tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi semua.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan

Kinerja Dinas Pendidikan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2025–2029 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 15 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Pendidikan sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melek huruf
2. Capaian APK dan APM masih di bawah standar Nasional dan Provinsi
3. Rata-rata lama Sekolah
4. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan.
5. Belum tercapainya standar pelayanan minimal Pendidikan
6. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
7. Kurangnya dorongan masyarakat untuk mengikuti Program Paket C

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten
Jember**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Manajemen dan implementasi kebijakan terkait proses pelayanan	1. Proses pelayanan yang panjang dan membutuhkan koordinasi waktu yang cukup 2. Terbatasnya SDM unsur pendidikan secara kuantitas dan kualitas.	1. Belum optimalnya pelayanan. 2. Kurangnya promosi perpustakaan hingga ke pelosok desa. 3. Sarana prasarana unsur pendidikan masih perlu banyak perbaikan dan penambahan. 4. Pengembangan SDM unsur pendidikan yang masih belum dilaksanakan secara maksimal.
2	Perbedaan kemampuan penggunaan teknologi untuk pelayanan	1. Adaptasi teknologi untuk pelayanan minimal tidak diserap secara maksimal 2. Kesenjangan perbedaan adaptivitas pemanfaat teknologi untuk pelayanan di kalangan masyarakat dan pengguna layanan	1. Belum optimalnya adaptasi teknologi yang dilaksanakan 2. Kurang nya kesadaran masyarakat dan unsur pengguna layanan dalam pemanfaatan teknologi untuk pelayanan yang lebih baik

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH
SEJAHTERA DAN MAJU"**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

**Tabel 2.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2	a. Akses Pendidikan yang Merata Membangun lebih banyak sekolah, menyediakan transportasi gratis bagi siswa di daerah terpencil, dan memperluas jangkauan internet untuk mendukung pembelajaran daring. Ini memastikan semua anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.	Ketidaksetaraan Ekonomi dan Sosial Kesenjangan ekonomi menyebabkan banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, seperti biaya seragam, buku, atau transportasi. Selain itu, faktor sosial seperti budaya kerja anak di pedesaan atau pernikahan dini juga dapat menghambat anak untuk menyelesaikan pendidikan.
		b. Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan pengembangan profesional. Guru yang kompeten dan berdedikasi akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, inovatif, dan menarik bagi siswa.	Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Kondisi bangunan sekolah yang rusak, kurangnya buku ajar, laboratorium, atau perpustakaan, serta minimnya akses listrik dan sanitasi di beberapa wilayah, dapat menurunkan kualitas pembelajaran dan membuat siswa tidak nyaman. Hal ini juga dapat menyebabkan siswa putus sekolah.

		c. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua Melibatkan masyarakat dan orang tua secara aktif dalam proses pendidikan. Ini dapat dilakukan melalui komite sekolah, program sukarelawan, dan komunikasi terbuka antara pihak sekolah dan keluarga. Dukungan dari orang tua dan komunitas sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif.	Manajemen Kurikulum dan Kebijakan yang Kurang Relevan Kurikulum yang terlalu teoritis dan tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja atau kehidupan sehari-hari dapat membuat siswa kehilangan motivasi belajar. Selain itu, kebijakan yang berubah-ubah tanpa persiapan yang matang dapat menghambat proses belajar mengajar.
--	--	---	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan pengembangan budaya dan bahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Kemendikbud memajukan pendidikan dan kebudayaan. Permasalahan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori: (1) rendahnya angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi, (2) rendahnya hasil pembelajaran, (3) ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis, dan (4) kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa.

A. Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Tinggi Indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. Namun khusus untuk capaian angka APK PAUD Indonesia masih jauh dibandingkan dengan angka negara-negara lain. Begitu juga angka partisipasi pendidikan tinggi belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Gambar 1.14 membandingkan angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi Indonesia dengan negara-negara lain, disandingkan dengan perbedaan PDB per kapita

B. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih belum menggembirakan. Pada pendidikan dasar dan menengah, hasil yang dicapai oleh peserta didik Indonesia dalam tes PISA sudah menunjukkan

kemajuan, namun ada banyak ruang untuk pengembangan. Gambar 1.15 memperlihatkan tren nilai tes PISA dan peringkat Indonesia dari tahun 2025-2029.

C. Ketimpangan Kualitas Pendidikan secara Geografis Kemendikbud menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini antara lain terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia. Penilaian ini bersifat low stake karena skor AKSI tidak digunakan sebagai salah satu faktor penentu kelulusan atau kenaikan kelas, sehingga kajian yang berdasarkan skor AKSI diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa SD. Gambar 1.20 memperlihatkan distribusi nilai AKSI SMP pada tahun 2025.

D. Kebudayaan, Perbukuan, dan Bahasa Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan dapat terlihat dari 4 (empat) permasalahan yang mengemuka yakni: (1) kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan, (2) nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya, (3) bahasa dan sastra daerah, dan (4) sistem perbukuan.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan yang bermutu di seluruh jenjang	Adanya kesenjangan kualitas pendidikan baik dalam segi sumber daya serta sarana prasarana	Program percepatan kualitas pendidikan oleh pemeritahan pusat	Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang belum merata

	Kolaborasi tenaga pendidikan dan unsur pendidikan kurang merata	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan	Standar kompetensi tenaga kependidikan yang belum terpenuhi maksimal
Penguatan karakter peserta didik	Pola pikir yang unik tiap daerah dipengaruhi dampak negatif dari perkembangan media sosial	Motivasi dengan kesadaran diri penuh dari siswa untuk membentuk karakter yang baik	Pengaruh lingkungan social yang dinamis, serta peran orang tua dalam mendidik
Peningkatan tata kelola bidang pendidikan	Relevansi kurikulum yang berubah dalam penerapannya	Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta hasil dari evaluasi pendidikan dan kebijakan pemerintah dalam mendukung program kurikulum	Implementasi kurikulum kurang maksimal karena sumber daya manusia yang belum kompeten dan kebijakan pemerintah kurang mendukung
	Ketidakmerataan akses dan mutu pendidikan	Pemerintah tiap tahun secara rutin mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan akses pendidikan untuk upacara peningkatan mutu pendidikan	Ketimpangan pembangunan infrastruktur daerah dan alokasi sumber daya belum memadai
	Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pendidikan	Adanya SDM yang berkualitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran proses pendidikan	Kurangnya keterbukaan informasi, minimnya partisipasi publik, dan indikasi kasus penyimpangan dalam pengelolaan anggaran proses pendidikan

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Pendidikan	Kurangnya pemerataan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidikan baik dalam infrastruktur, sarana – prasaran, pelatihan kompetensi tenaga pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan	Program pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah selaras dalam peningkatan kualitas pendidikan seperti halnya dalam bidang tenaga pendidikan adanya Guru Penggerak	Kurangnya pemerataan kualitas dan kompetensi pendidikan karena perbedaan kebijakan tiap daerah

2.2 Penentuan isu-isu strategis

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Kurangnya partisipasi aktif masyarakat, pemangku kebijakan, dan unsur tenaga kependidikan	Belum optimalnya pemanfaatan yang cepat, akurat, dan transparan	Digitalisasi	Perbedaan prioritas pembangunan dan inovasi pelayanan	Sumber daya pembangunan belum merata dan partisipasi aktif pelayanan	Kualitas SDM, prioritas pembangunan dan perbaikan tata kelola pelayanan pendidikan

Isu – isu strategis pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dirancang dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun. 2025 – 2029 disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan strategis agar sasaran lima tahun kedepan lebih realistis dan konsisten dengan prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel dan demokratis. Analisis situasi yang dikaji dalam bab ini dapat dilihat dari tantangan internal maupun eksternal. Analisis situasi menelaah keberhasilan dan masalah-masalah yang dikelompokkan kedalam tema-tema pokok kebijakan pendidikan nasional yaitu pemerataan dan perluasan akses, mutu dan relevansi serta tata kelola dan akuntabilitas.

1. Pemerataan dan Perluasan Akses.

Mutu pendidikan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas masukan pendidikan (*Tahune quality of intakes*) yaitu kesiapan mental dan emosional anak untuk memasuki Sekolah Dasar. Hal ini terkait dengan kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungan baru, mengelola emosi, dan memiliki kemandirian. Pendidikan anak usia dini dapat membantu meningkatkan kualitas masukan pendidikan melalui pelatihan kemandirian anak, membangun keterampilan sosial, memberikan dukungan emosional, serta membiasakan rutinitas dan komunikasi positif tentang sekolah. Pendidikan Anak Usia Dini

dilaksanakan melalui dua jalur yaitu PAUD jalur pendidikan formal yaitu Taman Kanak Kanak dan jalur pendidikan Non formal yaitu kelompok bermain.

Data jumlah anak usia PAUD berdasarkan LPPD tahun 2024 sekitar 184.451 anak usia 0 – 5 Tahun, baru 47.248 anak (26%) yang memperoleh pelayanan PAUD. Sedangkan jumlah anak usia 5 – 6 tahun ada 76.173 anak. Ada 31% anak memperoleh layanan pendidikan di TK dan sejumlah 1.063 memperoleh layanan PAUD (Kelompok Bermain). Diantara anak-anak yang memperoleh kesempatan PAUD tersebut pada umumnya berasal dari keluarga mampu di daerah perkotaan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak pedesaan belum memperoleh kesempatan layanan PAUD secara proporsional. Saat ini akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan dan pemerataan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih terbatas dan tidak merata.

Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk usia 7–12 tahun ada 97,35% dan usia 13–15 terdapat 51,04 %. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat 2,65 % anak usia 7 – 12 tahun dan sekitar 48,96 % anak usia 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah. Dari analisis menunjukkan bahwa ada anak belum pernah sekolah, putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka putus Sekolah/DO untuk tingkat SD/MI sebesar 0,63 % terutama pada kelas-kelas tinggi di kecamatan tertentu. Angka putus sekolah pada Tingkat SMP/MA sebesar 0,41 %. Sedangkan angka melanjutkan ke SMP/MTs belum maksimal, hanya 68,96 % kondisi ini menunjukkan masih ada 31,54 % lulusan SD/MI yang belum melanjutkan ke tingkat SMP/Mts. Adanya anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar terutama yang terjadi di tingkat SD/MI menjadi salah satu faktor yang berpotensi untuk menjadi warga buta aksara. Hal ini akan menjadi beban sosial dikemudian hari.

Angka partisipasi murni untuk SMA/MA hanya mencapai 33,14% artinya ada 66,86% lulusan SMP/MTS tidak melanjutkan ke jenjang SMA/MA. Angka putus sekolah SMA/MA sebesar 1,43%.

Pendidikan bagi anak perempuan hasil analisis menunjukkan tingkat partisipasi perempuan 7 – 12 tahun (20%) di bawah laki-laki (50,4%). Untuk itu perlu adanya upaya khusus untuk mendorong anak perempuan minimal dapat menyelesaikan ke pendidikan dasar 9 tahun. Pada kecamatan-kecamatan

tertentu masih diperlukan upaya mempercepat penyetaraan gender dan pendidikan.

Layanan Pendidikan khususnya bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia memadai dari 9 lembaga PLB, yang berstatus negeri hanya satu (SDLB) dan yang lain di kelola swasta, sehingga layanannya belum maksimal.

Kondisi infrastruktur SD/MI, jumlah gedung SD/MI 1511, yang kondisinya rusak berat 685 Lembaga, kerusakan sedang/ringan 82 lembaga, penanganan sampai tahun 2005 belum maksimal. Untuk SMP Negeri jumlah lembaga 62, yang berkondisi rusak berat 13 RK Sedangkan untuk SMA/SMK dari 24 lembaga Negeri yang kondisinya rusak berat dan ringan sejumlah 17RK. Kondisi infrastruktur ini dapat berpengaruh pada daya tampung sekolah terhadap peserta didik baru.

Kesenjangan akses terhadap pendidikan juga dapat dilihat dari angka melek aksara. Penduduk usia 15 – 44 tahun berjumlah 157.262 orang dan yang melek aksara sebesar 85,49%. Sedangkan angka buta aksara usia 15 – 44 Tahun mencapai 22,827 orang, dengan perbandingan jumlah laki-laki 10.452 orang dan perempuan 12.375 orang. Hal ini disebabkan adanya anak putus sekolah pada kelas rendah di SD, sebagian dari aksarawan baru karena kemampuan literasi yang telah dimiliki tidak digunakan lagi.

Pendidikan Non formal dalam menangani lembaga kursus belum maksimal hal ini terlihat pada jumlah lembaga kursus di Kabupaten Jember 25.000 yang telah terstandarisasi dan terakreditasi hanya 124 lembaga. Lembaga kursus tersebut terdiri dari jenis kursus bahasa ada 35, komputer 43, aritmatika 15, menjahit 9, bimbingan belajar 10, TRP 7, dan TKR 15.

Kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap kurangnya partisipasi masyarakat. Letak geografis yang berbukit dan bergelombang (utamanyanya wilayah utara dan timur Kabupaten Jember) menyulitkan orang tua dalam menyekolahkan anaknya sampai tuntas pendidikan dasar. Data geografis menunjukkan ada beberapa sekolah yang bahkan tidak terakses oleh internet dan memiliki jumlah peserta didik kurang. Misal SMPN 3 Tempurejo, sekolah ini tidak terjangkau akses internet jarak dengan SD terdekat adalah 16 Km. Saat ini sekolah ini hanya

memiliki 46 siswa. Jarak yang jauh dan kondisi geografis yang sulit menjadikan salah satu penyebab lulusan SD tidak melanjutkan Pendidikan ke Tingkat berikutnya.

Kesulitan akses ke fasilitas Pendidikan juga berdampak pada kemampuan ekonomi Masyarakat. Waktu tempuh yang lama mengakibatkan pemborosan waktu, padahal tidak sedikit anak-anak sekolah yang diberi kewajiban oleh orang tuanya untuk ikut membantu bekerja, dikarenakan biaya tempuh yang semakin mahal, oleh karena anak harus menempuh jalur alternative lewat jalan umum sehingga harus naik transportasi umum yang semakin memperberat biaya operasional sekolah. Kondisi yang berbukit, juga menguras energi anak saat menempuh sekolah sehingga kondisi anak sesampainya di sekolah tidak optimal untuk belajar, dan kondisi anak sesampainya pulang diajak membantu pekerjaan orang tua.

2. Mutu dan Relevansi Pendidikan.

Secara eksternal komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu meliputi :

- 1) Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kualitas dan kuantitas maupun kesejahteraan pendidikan belum memadai.
- 2) Prasarana dan sarana belajar yang belum didayagunakan secara optimal.
- 3) Biaya pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran.
- 4) Proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif

1) Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan pada pendidikan Non formal (PNF) juga memerlukan diperhatikan. Sampai tahun 2005 pamong belajar (TLD = Tenaga Teknis Lapangan) di kab. Jember berjumlah 35 orang dengan rincian 31 TLD dan 4 FDI (Fasilitator Desa Intensif). Kondisi ini sangat tidak memadai dibanding besarnya sasaran dan luasnya jangkauan program PNF. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pamong belajar adalah dapat memberikan pendampingan dan pemotivasian kepada masyarakat, namun kompetensi tersebut belum dimiliki mereka secara maksimal.

Tenaga fungsional lain dilingkungan PNF adalah penilik, yang pada saat ini berjumlah 31 orang. Tugas Penilik adalah pengendali program PNF namun belum semua penilik mempunyai kompetensi maksimal tentang penguasaan program dan kepenilikan PNF. Penilik PNF akan menangani warga belajar yang berjumlah paket A setara SD 112 orang, paket B setara SMP 1.038 orang, paket C setara SMA 155 orang, mereka akan mengikuti ujian sesuai dengan kesetaraannya.

Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Kabupaten Jember berdasarkan lapor rilis Dapodik per September 2025 ada sebanyak 14509 tenaga pendidik pada Pendidikan formal TK/SD/SMP. Berdasar analisis kebutuhan tenaga pendidik masih kekurangan guru sebanyak TK 6 Orang pendidik, SD 4736 Orang pendidik, dan SMP 1110 orang pendidik dengan status ASN.

- 2) Dari aspek fisik, sarana-prasarana penunjang pendidikan belum memadai misalnya ketersediaan ruang perpustakaan beserta kelengkapannya, ruang laboratorium IPA (Biologi, Fisika, Kimia, Bahasa) beserta kelengkapannya, ruang olah raga beserta kelengkapannya, ruang computer beserta kelengkapannya, ruang UKS beserta kelengkapannya, ruang Bimbingan dan Konseling yang representatif. Penggunaan dan pemanfaatan ICT dalam proses pembelajaran masih dalam lingkup terbatas. Jaringan info sekolah melalui internet juga masih terbatas pada SMK saja. Ketertinggalannya dalam pemanfaatan ICT merupakan isu kebijakan penting pembangunan pendidikan kab. Jember.
- 3) Biaya pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran
Tingginya biaya Pendidikan saat ini turut serta menyumbang pemerataan mutu dan relevansi Pendidikan. Sumber anggaran Pendidikan yang dikelola oleh sekolah Adalah BOS. Serapan anggaran BOSP untuk Kabupaten Jember sebesar Rp 287.752.775.376,00. Namun belum ada bantuan biaya personal untuk siswa. Biaya personal untuk siswa dapat berpengaruh pada APS. Seorang anak yang kesulitan biaya transportasi, kesulitan uang saku, kesulitan membeli perlengkapan sekolah, dapat menyebabkan berhenti sekolah. Sementara orang tua/masyarakat belum sepenuhnya sadar bahwa biaya pendidikan membutuhkan partisipasi masyarakat/orang tua juga.
- 4) Proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif

Salah satu sebab rendahnya mutu lulusan adalah belum efektifnya proses pembelajaran. Metode pembelajaran, strategi pembelajaran yang terlalu berorientasi pada guru (teacher oriented) cenderung mengabaikan hak-hak dan kebutuhan serta pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan mencerdaskan menjadi kurang optimal.

Selain itu juga disebabkan oleh kemampuan pengelolaan berbagai masukan pendidikan baik dalam menjalankan proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Hal ini dilihat dari lemahnya fungsi supervisi pendidikan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan (pengawas TK/SD maupun pengawas mata pelajaran untuk jenjang SMP/SMA/SMK), lebih-lebih pada jenjang SMP/SMA/SMK belum ditetapkan pengawas mata pelajaran karena rasio pengawas dan sekolah belum memadai. Penyebab lain belum maksimalnya supervisi rutin oleh pengawas pendidikan disebabkan kapasitas pengawas sekolah belum maksimal sehingga berdampak pada supervisi dan kinerja sekolah / kepala sekolah tidak rutin, tidak berkelanjutan dan tidak terdokumentasi yang baik.

Kelemahan pada aspek perencanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar tidak termonitoring secara efektif oleh para supervisor, sehingga kelemahan-kelemahan pada proses pembelajaran tidak dapat teridentifikasi secara akurat.

Rendahnya mutu hasil belajar ditandai oleh standart kelulusan yang ditetapkan yaitu 4,25 dari skala 10. Ini artinya bahwa seorang siswa yang dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan mampu menyerap 42,5%. Dengan standart yang rendahpun masih ada siswa yang tidak lulus. Pada Ujian-ujian Nasional tahun 2005 pada SMA/MA ketidak lulusan mencapai 0,39%, SMK 3,31% dan SMP/ MTS/ SMP Terbuka 7,24%. Dan nilai rata-rata yang dicapai untuk SMP/MTS untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia 6,68 Bahasa Inggris 6,35 dan Matematika 6,83.

Walaupun lulusan pada semua jenjang pendidikan belum maksimal namun potensi peserta didik kita cukup tinggi hal ini ditandai dengan berhasilnya siswa berbagai lomba sehingga meraih kejuaraan baik di tingkat propinsi maupun nasional pada bidang sains dan matematika dan bidang lainnya.

Dalam kaitannya dengan relevansi pendidikan maka pendidikan yang memiliki kekuatan daya saing ditandai dengan mutu pembelajaran dalam program pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Data menunjukkan bahwa kemampuan membentuk kecakapan lulusan pendidikan menengah agar dapat menjadi pekerja produktif dengan upah yang lebih tinggi belum maksimal.

Secara rinci kondisi aktual mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Nilai ujian Sekolah SD diketahui rata-rata untuk seluruh mata pelajaran 6,5 hal ini dapat ditafsirkan bahwa secara rerata lulusan SD menguasai 65% dari seluruh kompetensi yang seharusnya dikuasai sedangkan kompetensi minimal yang harus dikuasai 75%, sehingga ada kesenjangan 10%.
- 2) Rasio siswa guru dan siswa-kelas kondisi tahun 2005 rasio siswa guru (30:1) menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan dengan SPM (40 : 1), hal ini telah menunjukkan batas ideal. Namun masalah yang terjadi adalah ketidakmerataan distribusi guru. Rasio siswa-kelas menunjukkan angka 27,60 kondisi ini sudah ideal namun masih ada ketidakmerataan distribusi siswa persekolah.
- 3) Kelayakan mengajar guru, hal ini dapat dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan (untuk SD minimal D2), kondisi obyektif tahun 2005 ada 60,70% yang layak dan 29,3% dinilai belum layak. Dengan demikian masih perlu upaya sungguh-sungguh meningkatkan kualifikasi guru.
- 4) Rasio sekolah – perpustakaan, laboratorium IPA dan Laboratorium Bahasa belum tersentuh, hampir 99% SD belum memiliki sarana penunjang tersebut, sehingga pengembangan budaya baca dan budaya belajar menuju Learning Society masih terlambat.
- 5) Sarana pembelajaran (buku pelajaran pokok yang dimiliki siswa sangat minimal) demikian pula bahan ajar lainnya seperti alat-alat peraga, buku-buku referensi di perpustakaan, sarana olah raga usia dini.
- 6) Kompetensi prestasi akademik dan Non akademik termasuk festival science dalam kompetensi tingkat propinsi maupun tingkat nasional belum maksimal.
- 7) Pengembangan kurikulum muatan lokal Jember yang berbasis budaya ciri khas Kabupaten Jember belum ada, rancangan sementara mengembangkan muatan lokal bahasa Inggris dan olah raga pencak silat termasuk pengadaan bahan ajarnya.

- 8) Tindak lanjut dari dana hibah Jerman dalam kegiatan Science Education Quality Improvement Project (SEQIP) yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD belum mendapat prioritas dana APBD untuk pelaksanaan dan pengembangannya setelah Grant dari Jerman tersebut selesai.
- 9) Program kemitraan pendidikan dasar dengan Australia (IAPBE) diperlukan dana pendamping dari APBD, walaupun pada tahun 2005 sudah terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) namun ini masih sangat kurang karena sekolah sasaran sampai tahun 2007 ada 60 SD/MI, SMP/MTs.
- 10) Belum ada SD rujukan/ model di tiap Kecamatan yang dikembangkan secara maksimal semua komponennya (SDM, manajemen, PAKEM, fasilitas/ sarana-prasarana dan PSM) yang berstandar Nasional untuk menjadi aset daerah.
- 11) Terbatasnya kemampuan Pemuda dalam usaha mandiri.
 - a. Kurangnya peran Pemuda dalam berperan aktif dan ikut partisipasi dalam pembangunan.
 - b. Terbatasnya wawasan Pemuda dalam menyikapi masalah-masalah pembangunan dan kebangsaan.
 - c. Terbatasnya jumlah dan masih lemahnya kualitas SDM yang menangani Olahraga.
 - d. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.
 - e. Kebudayaan daerah kurang berkembang

3. Tata Kelola dan Akuntabilitas

Pemerintah telah mengembangkan model desentralisasi pengelolaan pendidikan, dampak positifnya mulai tampak dan dirasakan oleh berbagai pihak misalnya a) penetapan formula dan mekanisme bantuan bagi perbaikan dan pengembangan satuan pendidikan, b) penguatan proses akuntabilitas dan education governance, c) penetapan sistem keuangan dan perencanaan sekolah, d) pengembangan kapasitas (capacity building) mulai dari Kantor Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan Kecamatan dan Satuan Pendidikan (sekolah). Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Salah satu kendalanya belum tersedianya sistem informasi manajemen yang akurat. Sedangkan dampak yang kurang positif dari desentralisasi adalah perencanaan dan pelaksanaan program belum

didukung oleh data dan informasi yang akurat pada berbagai tingkatan. Analisis situasi dari tata kelola dan akuntabilitas adalah :

- a.** Beberapa SD yang berdekatan atau satu komplek yang mempunyai jumlah siswa yang tidak mencapai SPM tidak efektif bila dikelola beberapa lembaga maka perlu ada konsolidasi dan revitalisasi.
- b.** Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SD belum maksimal karena belum difahami esensi dari MBS oleh warga sekolah termasuk komite sekolah.
- c.** Hasil penilaian kinerja sekolah bagi kepala SD untuk komponen EMASLIM (Edukator, Manajer, Supervisor, Leader, INomovator dan Motivator) yang berbasis periodisasi dan penilaian rutin tahunan belum kesemuanya berkriteria nilai memuaskan dan baik.
- d.** Belum semua lembaga SD mendapat penilaian kelayakan lembaga (Akreditasi) dari BAS (Badan Akreditasi Sekolah) karena belum semuanya siap untuk diakreditasi.
- e.** Pemberdayaan SDM tenaga Kependidikan sesuai dengan tupoksinya karena belum difahaminya pengembangan kapasitas building disetiap lembaga. Demikian pula kesejahteraannya masih minimal.
- f.** Intensifikasi supervisi dan pengembangan monitoring, evaluasi dan laporan yang komperehensif yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah belum optimal karena disparitas kemampuan/ pemahaman tentang manajemen sekolah, pembelajaran, penilaian.
- g.** Manajemen gugus/SD Inti beberapa belum dikelola secara professional karena pembinaan dari instansi yang terkait belum optimal.
- h.** Belum ada pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan karena keterbatasan sarana, kompetensi tentang teknologi dilingkungan pendidikan (TK, SD, UPTD Pendidikan, SMP, SMA, SMK, dengan Kantor Dinas Pendidikan).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dirancang dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun. 2025 – 2029 disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan strategis agar sasaran lima tahun kedepan lebih realistis dan konsisten dengan prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel dan demokratis. Analisis situasi yang dikaji dalam bab ini dapat dilihat dari tantangan internal maupun eksternal. Analisis situasi menelaah keberhasilan dan masalah-masalah yang dikelompokkan kedalam tema-tema pokok kebijakan pendidikan nasional yaitu pemerataan dan perluasan akses, mutu dan relevansi serta tata kelola dan akuntabilitas.

Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN											
- Meningkatnya Akses Pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas serta merata	Meningkatnya Akses Pendidikan yang Merata		Indeks pendidikan (Indeks)	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	
		Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan yang Bermutu	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,5	13,72	13,86	13,99	14,15	14,27	14,37	
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	6,93	6,96	7,03	7,11	7,24	7,3	7,31	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,71	81	82	83	84	85	86	

Gambar.3.1 Cascading Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : (diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)	DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU			
MISI : (diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)	MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, UNGGUL DAN SETARA MELALUI PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN, KESEHATAN DALAM MAYARAKAT YANG AMAN SERTA NYAMAN.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Akses Pendidikan yang berkualitas serta merata dalam peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah				
	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu	1. "Peningkatan Akses Pendidikan Bermutu" * Membangun dan merehabilitasi sarana prasarana pendidikan di daerah tertinggal. * Memberikan bantuan operasional pendidikan secara merata dan adil. 2. "Pemerataan Distribusi dan Kualitas Guru" * Penempatan guru berkualitas secara merata, termasuk skema insentif bagi guru di daerah terpencil. * Penguatan program pendidikan profesi guru dan pelatihan berkelanjutan. 3. "Digitalisasi dan Inovasi Pembelajaran" * Pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh dan hybrid. * Penyediaan perangkat TIK dan internet untuk sekolah-sekolah di wilayah belum terjangkau. 4. "Penguatan Tata Kelola dan Kemitraan" * Mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung pendidikan. * Penguatan data pendidikan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).	* Menjamin kesetaraan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas di seluruh wilayah. * Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pendidik secara merata. * Menyediakan layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dan kelompok marjinal. * Mendorong inovasi dan fleksibilitas dalam metode pembelajaran yang adaptif terhadap konteks lokal. * Membangun sistem monitoring dan evaluasi pemerataan mutu pendidikan secara berkala.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pendidikan.

4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.456.485.896.737,5		1.643.250.944.804,23		1.722.644.242.802,69		1.806.394.608.037,07		1.894.396.657.631,05
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						889.153.436.419,5		1.028.229.513.985,23		1.079.640.989.684,69		1.133.623.039.168,57		1.190.304.191.127,15
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	90			92	889.153.436.419,5	93	1.028.229.513.985,23	94	1.079.640.989.684,69	95	1.133.623.039.168,57	96	1.190.304.191.127,15
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	94			96		96,5		97		97,5		98	
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	77			78		78		78,5		78,5		79	
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.513.046.527,55		11.910.643.583,23		12.328.120.491,69		12.766.471.245,57		13.226.739.537,15
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4			5	11.513.046.527,55	6	11.910.643.583,23	5	12.328.120.491,69	6	12.766.471.245,57	6	13.226.739.537,15
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4			4		4		4		4		4	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4			4		4		4		4		4	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2			4		4		4		4		4	
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8			10		10		10		10		10	
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.081.199.483,55		1.285.259.457.73		4.499.522.430,61		4.724.498.552,14		3,613,636,137.36
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	10	1.1761.807.753,17	10	4.081.199.483,55	10	1285259457.73	10	4.499.522.430,61	10	4.724.498.552,14	10	3,613,636,137.36
1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen						661.085.880		694.140.174		728.847.182,7		765.289.541,84		803.554.018,93

RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	4	384.853.200,11	4	661.085.880	4	694.140.174	4	728.847.182,7	4	765.289.541,84	4	803.554.018,93
1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156,25
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625	1	127.628.156,25
1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156,25
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625	1	127.628.156,25
1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156,25
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625	1	127.628.156,25
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.894.655.750		3.039.388.537,5		3.191.357.964,38		3.350.925.862,59		3.518.472.155,72
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	4	2.917.785.000,00	4	2.894.655.750	4	3.039.388.537,5	4	3.191.357.964,38	4	3.350.925.862,59	4	3.518.472.155,72

1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.561.105.414		561,105,414.00		1.561.105.414		1.561.105.414		1.561.105.414
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	2.932.456.137,02	4	1.561.105.414	4	561,105,414.00	4	1.561.105.414	4	1.561.105.414	4	1.561.105.414
1.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						500.000.000		500.000.000,00		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000,00	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
1.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						500.000.000		500.000.000,00		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000,00	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
1.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4	0	0	5	600.000.000	6	600.000.000	5	600.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000
1.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita)	1	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000

	Acara)													
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						835.944.616.775,95		972.170.121.793		1.020.538.769.194		1.071.271.149.128		1.124.479.978.245
Persentase dokumen keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai dengan pedoman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1			1	835.944.616.775,95	1	972.170.121.793	1	1.020.538.769.194	1	1.071.271.149.128	1	1.124.479.978.245
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15.626			14.900		14.950		15.000		15.050		15.050	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12			12		12		12		12		12	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10			10		10		10		10		10	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4			4		4		4		4		4	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	

1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						834.375.518.075,95		864,333,680,213.47		778.561.551.512,60		752.833.733.005,28		721.418.606.710,56
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15.626	14868	911.737.892.991, 54	14.900	834.375.518.075,95	14.950	864,333,680,213.47	15.000	778.561.551.512,60	15.050	752.833.733.005,28	15.050	721.418.606.710,56
1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						369.098.700		369.098.700		369.098.700		369.098.700		369.098.700
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	614.382.525,00	4	369.098.700	4	369.098.700	4	369.098.700	4	369.098.700	4	369.098.700
1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10	0	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000
1.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
1.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	1	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000

Pemeriksaan	Pemeriksaan (Dokumen)													
1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	0	0	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
1.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.616.250.500		1.616.250.500		1.616.250.500		1.616.250.500		1.616.250.500
Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibukukan sesuai pedoman	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1			1	1.616.250.500	1	1.616.250.500	1	1.616.250.500	1	1.616.250.500	1	1.616.250.500
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2			2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4			4		4		4		4		4	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1		1	

	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1		1	
1.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	0	0	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
1.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	0	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
1.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	0	0	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
1.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					716.250.500		216,250,500.00		716.250.500		716.250.500		716.250.500	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	4	4	716.250.500,00	716.250.500	4	216,250,500.00	4	716.250.500	4	716.250.500	4	716.250.500	

	Daerah pada SKPD (Laporan)													
1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
1.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.512.500.000		5.788.125.000		6.077.531.250		6.381.407.814		6.700.478.202
Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	75			75	5.512.500.000	75	5.788.125.000	75	6.077.531.250	75	6.381.407.814	75	6.700.478.202
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	100			100		100		100		100		100	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	250			250		250		250		250		250	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1			1		1		1		1		1	

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	80			80		80		80		80		80	
1.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						525.000.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	75	0	0	75	525.000.000	75	551.250.000	75	578.812.500	75	607.753.125	75	638.140.781
1.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						2.625.000.000		756.250.000.00		2.894.062.500		3.038.765.625		3.190.703.906
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0	1	2.625.000.000	1	756.250.000.00	1	2.894.062.500	1	3.038.765.625	1	3.190.703.906
1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.938		191.442.234
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	0	1	157.500.000	1	165.375.000	1	173.643.750	1	182.325.938	1	191.442.234
1.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.938		191.442.234
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	0	1	157.500.000	1	165.375.000	1	173.643.750	1	182.325.938	1	191.442.234
1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.938		191.442.234
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	0	0	1	157.500.000	1	165.375.000	1	173.643.750	1	182.325.938	1	191.442.234
1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.050.000.000		102.500.000.00		1.157.625.000		1.215.506.250		1.276.281.563
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	80	0	0	80	1.050.000.000	80	102.500.000.00	80	1.157.625.000	80	1.215.506.250	80	1.276.281.563

	Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													
1.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						525.000.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	250	0	0	250	525.000.000	250	551.250.000	250	578.812.500	250	607.753.125	250	638.140.781
1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						315.000.000		330.750.000		347.287.500		364.651.875		382.884.469
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	0	0	100	315.000.000	100	330.750.000	100	347.287.500	100	364.651.875	100	382.884.469
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.166.766.466		3.276.832.926		3.392.402.709		3.513.750.981		3.641.166.667
Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1			1	3.166.766.466	1	3.276.832.926	1	3.392.402.709	1	3.513.750.981	1	3.641.166.667
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2			2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1	

	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2			2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2			2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1			1		1		1		1		1	
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.897.800		8.897.800		8.897.800		8.897.800		8.897.800
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.897.800,00	1	8.897.800	1	8.897.800	1	8.897.800	1	8.897.800	1	8.897.800
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						710.861.866		710.861.866		710.861.866		710.861.866		710.861.866
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	483.389.466,00	1	710.861.866	1	710.861.866	1	710.861.866	1	710.861.866	1	710.861.866
1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						178.487.000		178.487.000		178.487.000		178.487.000		178.487.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	178.487.000,00	1	178.487.000	1	178.487.000	1	178.487.000	1	178.487.000	1	178.487.000
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						525.000.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0	1	525.000.000	1	551.250.000	1	578.812.500	1	607.753.125	1	638.140.781
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						67.190.600		67.190.600		67.190.600		67.190.600		67.190.600
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1	1	67.190.600,00	1	67.190.600	1	67.190.600	1	67.190.600	1	67.190.600	1	67.190.600

	Disediakan (Paket)													
1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250		255.256.313
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	0	0	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	243.101.250	1	255.256.313
1.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material						105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	0	0	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625	1	127.628.156
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu						105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	0	0	2	105.000.000	2	110.250.000	2	115.762.500	2	121.550.625	2	127.628.156
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						836.329.200		578,145,660.00		922.052.943		968.155.590		1.016.563.370
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	424.261.000,00	1	836.329.200	1	578,145,660.00	1	922.052.943	1	968.155.590	1	1.016.563.370
1.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	0	0	2	105.000.000	2	110.250.000	2	115.762.500	2	121.550.625	2	127.628.156
1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						315.000.000		330.750.000		347.287.500		364.651.875		382.884.469
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	0	0	2	315.000.000	2	330.750.000	2	347.287.500	2	364.651.875	2	382.884.469
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.900.000.000		19.845.000.000		20.837.250.000		21.879.112.501		22.973.068.127

Persentase barang milik pemerintah daerah yang dibukukan sesuai pedoman	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4			4	18.900.000.000	4	19.845.000.000	4	20.837.250.000	4	21.879.112.501	4	22.973.068.127
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	3			3		3		3		3		3	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5			5		5		5		5		5	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	75			75		75		75		75		75	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6			6		6		6		6		6	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1			1		1		1		1		1	
1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.362.500.000		480.625.000.00		2.604.656.250		2.734.889.063		2.871.633.516
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	75	0	0	75	2.362.500.000	75	480.625.000.00	75	2.604.656.250	75	2.734.889.063	75	2.871.633.516
1.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.100.000.000		205.000.000.00		2.315.250.000		2.431.012.500		2.552.563.125
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	0	0	5	2.100.000.000	5	205.000.000.00	5	2.315.250.000	5	2.431.012.500	5	2.552.563.125
1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						2.100.000.000		205.000.000.00		2.315.250.000		2.431.012.500		2.552.563.125
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	2.100.000.000	1	205.000.000.00	1	2.315.250.000	1	2.431.012.500	1	2.552.563.125

1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.100.000.000		205,000,000.00		2.315.250.000		2.431.012.500		2.552.563.125
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	0	0	6	2.100.000.000	6	205,000,000.00	6	2.315.250.000	6	2.431.012.500	6	2.552.563.125
1.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya						1.050.000.000		502,500,000.00		1.157.625.000		1.215.506.250		1.276.281.563
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	1.050.000.000	1	502,500,000.00	1	1.157.625.000	1	1.215.506.250	1	1.276.281.563
1.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud						787.500.000		226,875,000.00		868.218.750		911.629.688		957.211.172
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	3	0	0	3	787.500.000	3	226,875,000.00	3	868.218.750	3	911.629.688	3	957.211.172
1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.250.000.000		1,512,500,000.00		5.788.125.000		6.077.531.250		6.381.407.813
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	5.250.000.000	1	1,512,500,000.00	1	5.788.125.000	1	6.077.531.250	1	6.381.407.813
1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.050.000.000		102,500,000.00		1.157.625.000		1.215.506.250		1.276.281.563
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	1.050.000.000	1	102,500,000.00	1	1.157.625.000	1	1.215.506.250	1	1.276.281.563
1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.100.000.000		505,000,000.00		2.315.250.000		2.431.012.500		2.552.563.125
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0	0	4	2.100.000.000	4	505,000,000.00	4	2.315.250.000	4	2.431.012.500	4	2.552.563.125
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.153.927.000		2.302.930.825		2.463.515.589		2.636.673.414		2.823.487.333
Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2	2.913.000,00	1	2.153.927.000	1	2.302.930.825	1	2.463.515.589	1	2.636.673.414	1	2.823.487.333
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	75			75		75		75		75		75	

	(Unit)													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6			6		6		6		6		6	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1			1		1		1		1		1	
1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					15.277.500,00		16.041.375,00		16.843.444,00		17.685.616,00		18.569.897,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1	15.277.500,00	1	16.041.375,00	1	16.843.444,00	1	17.685.616,00	1	18.569.897,00
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					826.149.500,00		208.764.450,00		999.640.895,00		1.099.604.985,00		1.209.565.483,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1			1	826.149.500,00	1	208.764.450,00	1	999.640.895,00	1	1.099.604.985,00	1	1.209.565.483,00
1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					787.500.000,00		226.875.000,00		868.218.750,00		911.629.688,00		957.211.172,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0	1	787.500.000,00	1	226.875.000,00	1	868.218.750,00	1	911.629.688,00	1	957.211.172,00
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					525.000.000,00		151.250.000,00		578.812.500,00		607.753.125,00		638.140.781,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0	1	525.000.000,00	1	151.250.000,00	1	578.812.500,00	1	607.753.125,00	1	638.140.781,00
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.346.329.150,00		11.319.609.358,00		12.387.149.951,00		13.558.223.585,00		14.843.022.516,00	
Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4			4	10.346.329.150,00	4	11.319.609.358,00	4	12.387.149.951,00	4	13.558.223.585,00	4	14.843.022.516,00
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7			10		10		10		10		10	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	26			50		50		50		50		50	

	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6			6		6		6		6		6	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30			30		30		30		30		30	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100			20		20		20		20		20	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1			1		1		1		1		1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1			1		1		1		1		1	
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						86.013.900		90.314.595		94.830.325		99.571.841		104.550.433
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	10	119.030.500,00	10	86.013.900	10	90.314.595	10	94.830.325	10	99.571.841	10	104.550.433
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						511.040.250		536.592.263		563.421.876		591.592.969		621.172.618
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	50	439.705.000,00	50	511.040.250	50	536.592.263	50	563.421.876	50	591.592.969	50	621.172.618
Lapangan														

1.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel						525.000.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	0	0	30	525.000.000	30	551.250.000	30	578.812.500	30	607.753.125	30	638.140.781
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						495.000.000		544.500.000		598.950.000		658.845.000		724.729.500
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	100	360.000.000,00	20	495.000.000	20	544.500.000	20	598.950.000	20	658.845.000	20	724.729.500
1.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	0	0	6	105.000.000	6	110.250.000	6	115.762.500	6	121.550.625	6	127.628.156
1.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000		402.627.500
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4	0	0	4	275.000.000	4	302.500.000	4	332.750.000	4	366.025.000	4	402.627.500
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.949.275.000		1,344,202,500.00		4.778.622.750		5.256.485.025		5.782.133.528
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	497.490.000,00	1	3.949.275.000	1	1,344,202,500.00	1	4.778.622.750	1	5.256.485.025	1	5.782.133.528
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.200.000.000		1,420,000,000.00		2.662.000.000		2.928.200.000		3.221.020.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	2.200.000.000	1	1,420,000,000.00	1	2.662.000.000	1	2.928.200.000	1	3.221.020.000
1.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.200.000.000		1,420,000,000.00		2.662.000.000		2.928.200.000		3.221.020.000

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	2.200.000.000	1	1,420,000,000.00	1	2.662.000.000	1	2.928.200.000	1	3.221.020.000
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						455.745.891.454		491.519.549.833		513.326.278.083		536.610.745.081		561.123.601.529
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah (%)	94			95	455.745.891.454	96	491.519.549.833	97	513.326.278.083	98	536.610.745.081	99	561.123.601.529
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						178.093.314.760		220.493.086.485		231.353.688.967		242.511.330.216		254.658.862.168
Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Rumah Dinas 2Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2			3	178.093.314.760	4	220.493.086.485	5	231.353.688.967	6	242.511.330.216	7	254.658.862.168
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	10			11		12		13		14		15	
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	5			12		14		15		16		17	
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	3.000			3.000		3.000		3.001		3.002		3.003	
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	50			51		52		53		54		55	
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	20			21		22		23		24		25	
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	20			21		22		23		24		25	
	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2			3		4		5		6		7	
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	10	10	199.774.800,00	11		12		13		14		15	

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	884	1042	0	1.043		1.044		1.045		1.046		1.047	
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	50			50		50		51		52		53	
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	50			51		52		53		54		55	
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	4.000			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2			3		4		5		6		7	
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1			3		4		5		6		7	
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	194			201		202		203		204		205	
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	20			21		22		23		24		25	
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	500			501		502		503		504		505	
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2			3		4		5		6		7	
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2			3		4		5		6		7	
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	9			11		12		13		14		15	
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	44			51		52		53		54		55	

Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	3			4	5	6	7	8
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1			2	3	4	5	6
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1			3	4	5	6	7
Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	20			20	21	22	23	24
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2			3	4	5	6	7
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1			3	4	5	6	7
Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1			3	4	5	6	7
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	50			51	52	53	54	55
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	14	15	907.064.000,00	16	17	18	19	20
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1			2	3	4	5	6
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	572			1.043	1.044	1.045	1.046	1.047
Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1			2	3	4	5	6
Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	100			101	102	103	104	105

	manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)												
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	2.638			3.001		3.002		3.003		3.004		3.005
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	500			501		502		503		504		505
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2			3		4		5		6		7
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	2	1.300.000.000,00	3		4		5		6		7
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	9			11		12		13		14		15
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	44			51		52		53		54		55
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	3			4		5		6		7		8
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1			2		3		4		5		6
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1			3		4		5		6		7
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	20			20		21		22		23		24
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2			3		4		5		6		7
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1			3		4		5		6		7

	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1			3		4		5		6		7
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	50			51		52		53		54		55
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	14			16		17		18		19		20
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1			2		3		4		5		6
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	572			1.043		1.044		1.045		1.046		1.047
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1			2		3		4		5		6
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	100			101		102		103		104		105
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	2.638			3.001		3.002		3.003		3.004		3.005
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	500			501		502		503		504		505
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2			3		4		5		6		7
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2			3		4		5		6		7
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	9			11		12		13		14		15

Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	44			51	52	53	54	55
Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	3			4	5	6	7	8
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1			2	3	4	5	6
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1			3	4	5	6	7
Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	20			20	21	22	23	24
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2			3	4	5	6	7
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1			3	4	5	6	7
Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1			3	4	5	6	7
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	50			51	52	53	54	55
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	14			16	17	18	19	20
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1			2	3	4	5	6
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	572			1.043	1.044	1.045	1.046	1.047
Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1			2	3	4	5	6

	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	100			101		102		103		104		105	
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.042	1.042	158.440.391.082,00	1.043		1.044		1.045		1.046		1.047	
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	2.638	3000	188.023.000,00	3.001		3.002		3.003		3.004		3.005	
1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						0,00		330.750.000,00		347.287.500,00		364.651.875,00		328.884.469,00
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1			2	0,00	3	330.750.000,00	4	347.287.500,00	5	364.651.875,00	6	328.884.469,00
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00		161.500.000,00		694.575.000,00		729.303.750,00		765.768.938,00
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2			3	0,00	4	161.500.000,00	5	694.575.000,00	6	729.303.750,00	7	765.768.938,00
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00		161.500.000,00		694.575.000,00		729.303.750,00		765.768.938,00
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2			3	0,00	4	161.500.000,00	5	694.575.000,00	6	729.303.750,00	7	765.768.938,00
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah						0,00		161.500.000,00		694.575.000,00		729.303.750,00		765.768.938,00
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2			3	0,00	4	161.500.000,00	5	694.575.000,00	6	729.303.750,00	7	765.768.938,00

1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						320.064.000,00		101,227,600.00		101,227,600.00		101,227,600.00		101,227,600.00
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	14			16	320.064.000,00	17	101,227,600.00	18	101,227,600.00	19	101,227,600.00	20	101,227,600.00
1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00		130,750,000.00		347.287.500,00		364.651.875,00		382.884.469,00
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1			3	0,00	4	130,750,000.00	5	347.287.500,00	6	364.651.875,00	7	382.884.469,00
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00		282,000,000.00		926.100.000,00		972.405.000,00		1.021.025.250,00
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2			3	0,00	4	282,000,000.00	5	926.100.000,00	6	972.405.000,00	7	1.021.025.250,00
1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00		141,000,000.00		463.050.000,00		486.202.500,00		510.512.625,00
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1			3	0,00	4	141,000,000.00	5	463.050.000,00	6	486.202.500,00	7	510.512.625,00
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						501.000.000,00		141,000,000.00		463.050.000,00		486.202.500,00		510.512.625,00
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1			3	501.000.000,00	4	141,000,000.00	5	463.050.000,00	6	486.202.500,00	7	510.512.625,00

1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					0,00		141.000.000,00		463.050.000,00		486.202.500,00		510.512.625,00
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		3	0,00	4	141.000.000,00	5	463.050.000,00	6	486.202.500,00	7	510.512.625,00
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah					835.595.800,00		511,305,831.00		1.061.871.122,00		1.114.964.678,00		1.170.712.912,00
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	10		11	835.595.800,00	12	511,305,831.00	13	1.061.871.122,00	14	1.114.964.678,00	15	1.170.712.912,00
1.01.02.2.01.0015 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah					0,00		677,580,800.00		511,305,831		511,305,831		511,305,831
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	5		12	0,00	14	677,580,800.00	15	511,305,831	16	511,305,831	17	511,305,831
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah					0,00		1,000,000,000.00		279,580,283.44		279,580,283.44		279,580,283.44
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	4.000		4.000	0,00	4.000	1,000,000,000.00	4.000	279,580,283.44	4.000	279,580,283.44	4.000	279,580,283.44
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					0,00		551.250.000,00		578.812.500,00		607.753.125,00		638.140.781,00
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	50		51	0,00	52	551.250.000,00	53	578.812.500,00	54	607.753.125,00	55	638.140.781,00
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					401.217.800,00		467.314.470,00		490.680.194,00		515.214.203,00		540.974.913,00
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	2.638		3.001	401.217.800,00	3.002	467.314.470,00	3.003	490.680.194,00	3.004	515.214.203,00	3.005	540.974.913,00
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					107.584.100,00		137.271.062,00		144.134.615,00		151.341.346,00		158.908.413,00
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	100		101	107.584.100,00	102	137.271.062,00	103	144.134.615,00	104	151.341.346,00	105	158.908.413,00

1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						158.583.852.589,00		158.583.852.589,00		158.583.852.589,00		158.583.852.589,00		158.583.852.589,00
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.042			1.043	158.583.852.589,00	1.044	158.583.852.589,00	1.045	158.583.852.589,00	1.046	158.583.852.589,00	1.047	158.583.852.589,00
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						50.292.900,00		137.271.062,00		144.134.615,00		151.341.346,00		158.908.413,00
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	5			6	50.292.900,00	7	137.271.062,00	8	144.134.615,00	9	151.341.346,00	10	158.908.413,00
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						0,00		392,250,000.00		1.041.862.500,00		93,955,625		93,955,625
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	3			4	0,00	5	392,250,000.00	6	1.041.862.500,00	7	93,955,625	8	93,955,625
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar						0,00		341,000,000.00		463.050.000,00		486.202.500,00		510.512.625,00
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2			3	0,00	4	341,000,000.00	5	463.050.000,00	6	486.202.500,00	7	510.512.625,00
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						0,00		120,500,000.00		231.525.000,00		243.101.250,00		255.256.313,00
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	884			1.043	0,00	1.044	120,500,000.00	1.045	231.525.000,00	1.046	243.101.250,00	1.047	255.256.313,00
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0		441.000.000		463.050.000		486.202.500		510.512.625
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	20	0	0	21	0	22	441.000.000	23	463.050.000	24	486.202.500	25	510.512.625
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						0		826.875.000		868.218.750		911.629.688		957.211.172

Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	500	0	0	501	0	502	826.875.000	503	868.218.750	504	911.629.688	505	957.211.172
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						0		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	20	0	0	21	0	22	551.250.000	23	578.812.500	24	607.753.125	25	638.140.781
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK						3.336.123.571		10.000.000.000		10.500.000.000		11.025.000.000		11.576.250.000
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	50	0	0	50	3.336.123.571	50	10.000.000.000	51	10.500.000.000	52	11.025.000.000	53	11.576.250.000
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						250.000.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781

Terlayannya satuan pendidikan pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	50	0	0	51	250.000.000	52	551.250.000	53	578.812.500	54	607.753.125	55	638.140.781
1.01.02.2.01.0044 - Penataan Ruang/Sudut Baca						0		441.000.000		463.050.000		486.202.500		510.512.625
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	20	0	0	20	0	21	441.000.000	22	463.050.000	23	486.202.500	24	510.512.625
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						0		6.000.000.000		6.300.000.000		6.615.000.000		6.945.750.000
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	3.000	0	0	3.000	0	3.000	6.000.000.000	3.001	6.300.000.000	3.002	6.615.000.000	3.003	6.945.750.000
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						0		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	50	0	0	51	0	52	110.250.000	53	115.762.500	54	121.550.625	55	127.628.156
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru						5.684.817.000		1.717.323.899		1.803.190.093		1.893.349.598		1.988.017.078
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	9	10	815.507.000,00	11	5.684.817.000	12	1.717.323.899	13	1.803.190.093	14	1.893.349.598	15	1.988.017.078
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						600.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250		255.256.313
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1	200.000.000,00	2	600.000.000	3	220.500.000	4	231.525.000	5	243.101.250	6	255.256.313
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						800.000.000		496.191.150		521.000.708		547.050.743		574.403.280
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	194	200	0	201	800.000.000	202	496.191.150	203	521.000.708	204	547.050.743	205	574.403.280

1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						55.800.000		157.973.918		165.872.613		174.166.244		182.874.556
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	572	1042	20.630.000,00	1.043	55.800.000	1.044	157.973.918	1.045	165.872.613	1.046	174.166.244	1.047	182.874.556
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						6.561.207.000		5.307.382.080		5.572.751.184		5.851.388.743		6.143.958.180
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	44	50	11.909.696.000,00	51	6.561.207.000	52	5.307.382.080	53	5.572.751.184	54	5.851.388.743	55	6.143.958.180
1.01.02.2.01.0052 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0		220.500.000		231.525.000		3.101.250		255.256.313
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1	0	0	3	0	4	220.500.000	5	231.525.000	6	3.101.250	7	255.256.313
1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0		330.750.000		347.287.500		364.651.875		382.884.469
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	2	0	3	330.750.000	4	347.287.500	5	364.651.875	6	382.884.469
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						0		11.466.000		12.039.300		12.641.265		13.273.328
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	20	20	5.760.000,00	21	0	22	11.466.000	23	12.039.300	24	12.641.265	25	13.273.328
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						5.760.000		2.882.706.134		3.026.841.440		3.178.183.512		3.337.092.688
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	10	10	7.669.322.451,14	11	5.760.000	12	2.882.706.134	13	3.026.841.440	14	3.178.183.512	15	3.337.092.688
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						181.363.801.894		163.600.624.041		169.175.457.844,25		175.990.627.033,11		182.105.902.145,89

Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	10			12	181.363.801.894	13	163.600.624.041	14	169.175.457.844,25	15	175.990.627.033,11	18	182.105.902.145,89
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1			1		1		1		2		2	
	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	2			4		5		6		7		8	
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.000			1.001		1.002		1.003		1.004		1.005	
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	1			1		2		2		2		2	
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1			2		3		3		3		4	
	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1			2		3		3		3		4	
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2			2		2		3		3		3	
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2			2		3		2		2		2	
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2			4		5		6		7		8	
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	165			172		174		178		180		183	
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	5			10		11		12		13		14	
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	614			735		772		810		851		893	
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	12.514			17.680		18.387		19.123		19.888		20.683	

Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	431			431		431		431		431		431	
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	431			431		431		431		431		431	
Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1			1		1		1		1		1	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3			4		5		6		7		7	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	7	10	450.000.000,00	10		12		13		14		16	
Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1			3		4		5		6		6	
Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2			2		2		2		3		3	
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1			5		6		6		7		10	
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7			10		10		12		14		16	
Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	5			5		5		5		5		5	
Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	2			1		4		4		4		5	
Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1			1		1		1		1		1	
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1			2		3		4		5		6	
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	1			2		3		4		5		6	

	yang Telah Dibangun (Ruang)													
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1			10		5		6		6		8	
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	7	7	1.775.747.200,00	7		9		10		11		12	
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1			3		4		5		6		7	
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1			10		2		2		3		3	
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	431			431		431		431		431		431	
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	352			370		388		407		427		449	
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	17.000			17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	333			368		386		405		425		447	
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	3	246.251.000,00	3		5		6		8		10	
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4			10		6		7		8		9	
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	10			15		17		20		22		25	
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	300			305		310		315		320		325	

	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	30			32		35		38		40		44	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	431			431		431		431		431		431	
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	8	10	1.198.272.000,00	10		14		15		16		17	
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	4	243.886.000,00	5		6		7		8		10	
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	10	0	0	11		12		13		14		15	
1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						0		992.250.000		1.041.862.500		1.093.955.625		1.148.653.406,25
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	0	0	1	0	1	992.250.000	1	1.041.862.500	1	1.093.955.625	1	1.148.653.406,25
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						147.350.000		560.000.000		560.000.000		840.000.000		840.000.000
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	10	147.350.000	2	560.000.000	2	560.000.000	3	840.000.000	3	840.000.000
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						365.500.000		1.500.000.000		1.800.000.000		2.100.000.000		2.250.000.000
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7	0	0	10	365.500.000	10	1.500.000.000	12	1.800.000.000	14	2.100.000.000	16	2.250.000.000
1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah						377.500.000		1.620.000.000		1.890.000.000		2.160.000.000		2.430.000.000
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4	0	0	10	377.500.000	6	1.620.000.000	7	1.890.000.000	8	2.160.000.000	9	2.430.000.000
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium						1.000.000.000		1.250.000.000		1.500.000.000		1.530.000.000		2.000.000.000
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	10	1.000.000.000	5	1.250.000.000	6	1.500.000.000	6	1.530.000.000	8	2.000.000.000
1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						354.300.000		303.007.500		304.522.537,5		306.045.150,19		307.575.375,94

Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	1	354.300.000	1	303.007.500	1	304.522.537,5	1	306.045.150,19	1	307.575.375,94
1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah						0		280.527.500		283.332.775		550.000.000		555.500.000
Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	0	0	1	0	1	280.527.500	1	283.332.775	2	550.000.000	2	555.500.000
1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0		469.246.000		473.938.460		690.000.000		703.800.000
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2	0	0	2	0	2	469.246.000	2	473.938.460	3	690.000.000	3	703.800.000
1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir						0		160.000.000		168.000.000		176.400.000		185.220.000
Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	1	0	0	1	0	2	160.000.000	2	168.000.000	2	176.400.000	2	185.220.000
1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah						0		212.180.000		300.000.000		315.000.000		330.750.000
Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2	0	0	2	0	2	212.180.000	3	300.000.000	3	315.000.000	3	330.750.000
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						7.287.770.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		800.000.000
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	7	10	450.000.000,00	10	7.287.770.000	12	600.000.000	13	650.000.000	14	700.000.000	16	800.000.000
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						255.296.800		1.726.477.714,29		1.918.308.571,43		2.110.139.428,57		2.301.970.285,71
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	7	7	1.775.747.200,00	7	255.296.800	9	1.726.477.714,29	10	1.918.308.571,43	11	2.110.139.428,57	12	2.301.970.285,71
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						500.000.000		600.000.000		630.000.000		700.000.000		1.000.000.000
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	0	0	5	500.000.000	6	600.000.000	6	630.000.000	7	700.000.000	10	1.000.000.000
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat						411.005.000		685.008.333,33		822.010.000		1.096.013.333,33		1.370.016.666,67

Perpustakaan Sekolah														
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	3	246.251.000,00	3	411.005.000	5	685.008.333,33	6	822.010.000	8	1.096.013.333,33	10	1.370.016.666,67
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						419.575.000		629.245.500		734.119.750		838.994.000		1.048.742.500
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	4	419.497.000,00	5	419.575.000	6	629.245.500	7	734.119.750	8	838.994.000	10	1.048.742.500
1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						0		720.000.000		756.000.000		793.800.000		900.000.000
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	2	0	0	1	0	4	720.000.000	4	756.000.000	4	793.800.000	5	900.000.000
1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0		600.000.000		750.000.000		900.000.000		945.000.000
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	0	0	3	0	4	600.000.000	5	750.000.000	6	900.000.000	6	945.000.000
1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir						0		240.000.000		252.000.000		264.600.000		320.000.000
Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	0	0	2	0	3	240.000.000	3	252.000.000	3	264.600.000	4	320.000.000
1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah						0		240.000.000		252.000.000		264.600.000		320.000.000
Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	0	0	2	0	3	240.000.000	3	252.000.000	3	264.600.000	4	320.000.000
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0		500.000.000		600.000.000		700.000.000		735.000.000
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3	0	0	4	0	5	500.000.000	6	600.000.000	7	700.000.000	7	735.000.000
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah						328.957.200		1.677.580.800		1.797.408.000		1.917.235.200		2.037.062.400
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	8	10	1.198.272.000,00	10	328.957.200	14	1.677.580.800	15	1.797.408.000	16	1.917.235.200	17	2.037.062.400

1.01.02.2.02.0026 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah						0		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	5	0	0	10	0	11	55.000.000	12	60.000.000	13	65.000.000	14	70.000.000
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah						0		85.000.000		100.000.000		110.000.000		125.000.000
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	10	0	0	15	0	17	85.000.000	20	100.000.000	22	110.000.000	25	125.000.000
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						0		60.637.500		63.669.375		66.852.843,75		70.195.485,94
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	17.000	0	0	17.000	0	17.000	60.637.500	17.000	63.669.375	17.000	66.852.843,75	17.000	70.195.485,94
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						81.034.583.000		47.595.043.308,38		49.498.845.043,32		52.046.998.847,77		35.935.198.305,76
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	12.514	17.000	65.906.255.507,00	17.680	81.034.583.000	18.387	47.595.043.308,38	19.123	49.498.845.043,32	19.888	52.046.998.847,77	20.683	35.935.198.305,76
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						0		137.812.500		144.703.125		151.938.281,25		159.535.195,31
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	431	0	0	431	0	431	137.812.500	431	144.703.125	431	151.938.281,25	431	159.535.195,31
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						85.224.514.294		85.925.905.804		86.355.535.333		86.787.313.010		87.221.249.575
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	431	431	85.224.514.294,00	431	85.224.514.294	431	85.925.905.804	431	86.355.535.333	431	86.787.313.010	431	87.221.249.575
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						69.500.000		71.464.050		75.037.253		78.789.115		82.728.571
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah	614	700	19.010.000,00	735	69.500.000	772	71.464.050	810	75.037.253	851	78.789.115	893	82.728.571

	Menengah Pertama (Orang)												
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						0		137.812.500		144.703.125		151.938.281,25	159.535.195,31
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	431	0	0	431	0	431	137.812.500	431	144.703.125	431	151.938.281,25	159.535.195,31
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan						356.920.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313	63.814.078
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	10	0	0	11	356.920.000	12	55.125.000	13	57.881.250	14	60.775.313	63.814.078
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						0		137.812.500		144.703.125		151.938.281	159.535.195
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	431	0	0	431	0	431	137.812.500	431	144.703.125	431	151.938.281	159.535.195
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						150.000.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	31.907.039
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2	0	0	4	150.000.000	5	27.562.500	6	28.940.625	7	30.387.656	31.907.039
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						0		137.812.500		144.703.125		151.938.281	159.535.195
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2	0	0	2	0	3	137.812.500	2	144.703.125	2	151.938.281	159.535.195
1.01.02.2.02.0056 - Penataan						0		55.125.000		80.000.000		84.000.000	88.200.000

Ruang/Sudut Baca														
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	5	0	0	5	0	5	55.125.000	5	80.000.000	5	84.000.000	5	88.200.000
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						71.738.400		52.002.720		54.602.856		57.332.999		60.199.649
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	352	352	11.790.000,00	370	71.738.400	388	52.002.720	407	54.602.856	427	57.332.999	449	60.199.649
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru						2.524.946.000		2.215.802.727		2.386.249.091		2.556.695.455		3.068.034.545
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	10	11	1.200.000.000,00	12	2.524.946.000	13	2.215.802.727	14	2.386.249.091	15	2.556.695.455	18	3.068.034.545
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						478.165.000		715.966.808		751.765.148		789.353.405		828.821.076
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	333	350	74.949.000,00	368	478.165.000	386	715.966.808	405	751.765.148	425	789.353.405	447	828.821.076
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						0		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.000	0	0	1.001	0	1.002	551.250.000	1.003	578.812.500	1.004	607.753.125	1.005	638.140.781
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						0		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	300	0	0	305	0	310	551.250.000	315	578.812.500	320	607.753.125	325	638.140.781
1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah						0		750.000.000		900.000.000		1.050.000.000		1.200.000.000
Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	2	0	0	4	0	5	750.000.000	6	900.000.000	7	1.050.000.000	8	1.200.000.000
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0		600.000.000		750.000.000		900.000.000		1.050.000.000

Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	0	0	3	0	4	600.000.000	5	750.000.000	6	900.000.000	7	1.050.000.000
1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0		750.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000		1.500.000.000
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	2	0	3	750.000.000	4	1.000.000.000	5	1.250.000.000	6	1.500.000.000
1.01.02.2.02.0066 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0		540.000.000		720.000.000		900.000.000		1.080.000.000
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1	0	0	2	0	3	540.000.000	4	720.000.000	5	900.000.000	6	1.080.000.000
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						6.181.200		3.519.215.276		3.600.116.776		3.640.567.527		21.357.996.156
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	165	169	8.927.178.000,00	172	6.181.200	174	3.519.215.276	178	3.600.116.776	180	3.640.567.527	183	21.357.996.156
1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK						0		3.307.500.000		3.472.875.000		3.646.518.750		3.828.844.688
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	30	0	0	32	0	35	3.307.500.000	38	3.472.875.000	40	3.646.518.750	44	3.828.844.688
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						88.473.203.000		80.267.085.832		84.280.440.123		88.166.262.125,7		92.919.185.223,54
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	20	0	0	21	88.473.203.000	22	80.267.085.832	23	84.280.440.123	24	88.166.262.125,7	25	92.919.185.223,54
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						88.473.203.000		80.267.085.832		84.280.440.123		88.166.262.125,7		92.919.185.223,54
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	20			21	88.473.203.000	22	80.267.085.832	23	84.280.440.123	24	88.166.262.125,7	25	92.919.185.223,54
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.877			1.878		1.879		1.880		1.881		1.882	

	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.877			1.878		1.879		1.880		1.881		1.882	
	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	50			51		52		53		54		55	
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	200			201		202		203		204		205	
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20			21		22		23		24		25	
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	20			21		22		23		24		25	
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	500			501		502		503		504		505	
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	200			201		202		203		204		205	
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.877			1.878		1.879		1.880		1.881		1.882	
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1.000			1.001		1.002		1.003		1.004		1.005	
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	300			301		302		303		304		305	
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10			11		12		13		14		15	
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	7			11		12		13		14		15	
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						1.347.500.000		1.323.000.000		1.389.150.000		1.458.607.500		1.531.537.875

Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	7	0	0	9	1.347.500.000	10	1.323.000.000	11	1.389.150.000	12	1.458.607.500	13	1.531.537.875
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD						886.229.400		744.187.500		781.396.875		820.466.718		861.490.054
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	50	0	0	51	886.229.400	52	744.187.500	53	781.396.875	54	820.466.718	55	861.490.054
1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD						0		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	50	0	0	51	0	52	110.250.000	53	115.762.500	54	121.550.625	55	127.628.156
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD						0		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	50	0	0	51	0	52	110.250.000	53	115.762.500	54	121.550.625	55	127.628.156
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						0		793.800.000		833.490.000		875.164.500		918.922.725
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	200	0	0	201	0	202	793.800.000	203	833.490.000	204	875.164.500	205	918.922.725
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						200.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250		255.256.312
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.877	0	0	1.878	200.000.000	1.879	220.500.000	1.880	231.525.000	1.881	243.101.250	1.882	255.256.312
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD						41.797.520.000		46.121.667.480		48.427.750.854		50.849.138.396,7		53.391.595.316,54
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.877	1.877	41.797.520.000,0	1.878	41.797.520.000	1.879	46.121.667.480	1.880	48.427.750.854	1.881	50.849.138.396,7	1.882	53.391.595.316,54
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						49.962.500		165.375.000		173.643.750		182.325.937		191.442.234
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	31	0	0	32	49.962.500	33	165.375.000	34	173.643.750	35	182.325.937	36	191.442.234
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi,						150.000.000		275.625.000		289.406.250		303.876.562		319.070.390

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100	0	0	101	150.000.000	102	275.625.000	103	289.406.250	104	303.876.562	105	319.070.390
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	20	0	0	21	0	22	110.250.000	23	115.762.500	24	121.550.625	25	127.628.156
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						150.000.000		275.625.000		289.406.250		303.876.562		319.070.390
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	300	0	0	301	150.000.000	302	275.625.000	303	289.406.250	304	303.876.562	305	319.070.390
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						269.500.000		3.307.500.000		3.472.875.000		3.646.518.750		3.828.844.687
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10	0	0	11	269.500.000	12	3.307.500.000	13	3.472.875.000	14	3.646.518.750	15	3.828.844.687
1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						50.000.000		330.750.000		347.287.500		36.451.875		382.884.468
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10	0	0	11	50.000.000	12	330.750.000	13	347.287.500	14	36.451.875	15	382.884.468
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru						3.167.000.000		6.615.000.000		6.945.750.000		7.293.037.500		7.657.689.375
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	20	10	1.568.000.000,00	21	3.167.000.000	22	6.615.000.000	23	6.945.750.000	24	7.293.037.500	25	7.657.689.375
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK						0		3.307.500.000		3.472.875.000		3.646.518.750		3.828.844.687
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	20	0	0	21	0	22	3.307.500.000	23	3.472.875.000	24	3.646.518.750	25	3.828.844.687

1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca						0		661.500.000		694.575.000		729.303.750		765.768.937
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	30	0	0	31	0	32	661.500.000	33	694.575.000	34	729.303.750	35	765.768.937
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	200	0	0	201	0	202	793.800.000	203	833.490.000	204	875.164.500	205	918.922.725
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						200.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250		255.256.312
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.877	0	0	1.878	200.000.000	1.879	220.500.000	1.880	231.525.000	1.881	243.101.250	1.882	255.256.312
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD						41.797.520.000		46.121.667.480		48.427.750.854		50.849.138.396,7		53.391.595.316,54
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.877	1.877	41.797.520.000,0 0	1.878	41.797.520.000	1.879	46.121.667.480	1.880	48.427.750.854	1.881	50.849.138.396,7	1.882	53.391.595.316,54
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						49.962.500		165.375.000		173.643.750		182.325.937		191.442.234
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	31	0	0	32	49.962.500	33	165.375.000	34	173.643.750	35	182.325.937	36	191.442.234
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						150.000.000		275.625.000		289.406.250		303.876.562		319.070.390
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100	0	0	101	150.000.000	102	275.625.000	103	289.406.250	104	303.876.562	105	319.070.390
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	20	0	0	21	0	22	110.250.000	23	115.762.500	24	121.550.625	25	127.628.156
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan						150.000.000		275.625.000		289.406.250		303.876.562		319.070.390

Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	300	0	0	301	150.000.000	302	275.625.000	303	289.406.250	304	303.876.562	305	319.070.390
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						269.500.000		3.307.500.000		3.472.875.000		3.646.518.750		3.828.844.687
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10	0	0	11	269.500.000	12	3.307.500.000	13	3.472.875.000	14	3.646.518.750	15	3.828.844.687
1.01.02.2.03.0029 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						50.000.000		330.750.000		347.287.500		36.451.875		382.884.468
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10	0	0	11	50.000.000	12	330.750.000	13	347.287.500	14	36.451.875	15	382.884.468
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru						3.167.000.000		6.615.000.000		6.945.750.000		7.293.037.500		7.657.689.375
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	20	10	1.568.000.000,00	21	3.167.000.000	22	6.615.000.000	23	6.945.750.000	24	7.293.037.500	25	7.657.689.375
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK						0		3.307.500.000		3.472.875.000		3.646.518.750		3.828.844.687
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	20	0	0	21	0	22	3.307.500.000	23	3.472.875.000	24	3.646.518.750	25	3.828.844.687
1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca						0		661.500.000		694.575.000		729.303.750		765.768.937
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	30	0	0	31	0	32	661.500.000	33	694.575.000	34	729.303.750	35	765.768.937
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	200	0	0	201	0	202	793.800.000	203	833.490.000	204	875.164.500	205	918.922.725
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						200.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250		255.256.312
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.877	0	0	1.878	200.000.000	1.879	220.500.000	1.880	231.525.000	1.881	243.101.250	1.882	255.256.312

1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD						41.797.520.000		46.121.667.480		48.427.750.854		50.849.138.396,7		53.391.595.316,54
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.877	1.877	41.797.520.000,00	1.878	41.797.520.000	1.879	46.121.667.480	1.880	48.427.750.854	1.881	50.849.138.396,7	1.882	53.391.595.316,54
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						49.962.500		165.375.000		173.643.750		182.325.937		191.442.234
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	31	0	0	32	49.962.500	33	165.375.000	34	173.643.750	35	182.325.937	36	191.442.234
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						150.000.000		275.625.000		289.406.250		303.876.562		319.070.390
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100	0	0	101	150.000.000	102	275.625.000	103	289.406.250	104	303.876.562	105	319.070.390
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	20	0	0	21	0	22	110.250.000	23	115.762.500	24	121.550.625	25	127.628.156
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						150.000.000		275.625.000		289.406.250		303.876.562		319.070.390
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	300	0	0	301	150.000.000	302	275.625.000	303	289.406.250	304	303.876.562	305	319.070.390
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						269.500.000		3.307.500.000		3.472.875.000		3.646.518.750		3.828.844.687
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10	0	0	11	269.500.000	12	3.307.500.000	13	3.472.875.000	14	3.646.518.750	15	3.828.844.687
1.01.02.2.03.0029 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						50.000.000		330.750.000		347.287.500		36.451.875		382.884.468

Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10	0	0	11	50.000.000	12	330.750.000	13	347.287.500	14	36.451.875	15	382.884.468
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru						3.167.000.000		6.615.000.000		6.945.750.000		7.293.037.500		7.657.689.375
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	20	10	1.568.000.000,00	21	3.167.000.000	22	6.615.000.000	23	6.945.750.000	24	7.293.037.500	25	7.657.689.375
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK						0		3.307.500.000		3.472.875.000		3.646.518.750		3.828.844.687
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	20	0	0	21	0	22	3.307.500.000	23	3.472.875.000	24	3.646.518.750	25	3.828.844.687
1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca						0		661.500.000		694.575.000		729.303.750		765.768.937
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	30	0	0	31	0	32	661.500.000	33	694.575.000	34	729.303.750	35	765.768.937
	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	5			6		7		8		9		10	
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	14			16		17		18		19		20	
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	14			15		16		17		18		19	
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1			2		3		4		5		6	
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	3.579			3.580		3.581		3.582		3.583		3.584	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5			6		7		8		9		10	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	5			6		7		8		9		10	

Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5			6		7		8		9		10	
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5			6		7		8		9		10	
Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	14			15		16		17		18		19	
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	5			6		7		8		9		10	
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	5			6		7		8		9		10	
Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5			6		7		8		9		10	
Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5			6		7		8		9		10	
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	7	3.336.222.600,00	6		7		8		9		10	
Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5			6		7		8		9		10	
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5			6		7		8		9		10	
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10			11		12		13		14		15	
Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	14	0	0	15		16		17		18		19	
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	50	0	0	51		52		53		54		55	

	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	21.000	0	0	21.001		21.002		21.003		21.004		21.005	
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	500	50.000.000,00	51		52		53		54		55	
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	29	0	0	30		31		32		33		34	
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100	0	0	101		102		103		104		105	
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	14	0	0	15		16		17		18		19	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	14	0	0	15		16		17		18		19	
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)				10		11		12		13		14	
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	10	0	0	11		12		13		14		15	
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	5	0	0	6		7		8		9		10	
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	5	0	0	6		7		8		9		10	
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	300	0	0	301		302		303		304		305	
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	29	0	0	30		31		32		33		34	
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						0		6.835.500.000		7.177.275.000		7.536.138.750		7.912.945.687,5

Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	21.000	0	0	21.001	0	21.002	6.835.500.000	21.003	7.177.275.000	21.004	7.536.138.750	21.005	7.912.945.687,5
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						0		180.192.600		189.202.230		198.662.341,5		208.595.458,58
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	14	14	6.720.000,00	15	0	16	180.192.600	17	189.202.230	18	198.662.341,5	19	208.595.458,58
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						2.290.350.000		2.525.110.875		2.651.366.418,75		2.783.934.739,69		2.923.131.476,67
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	50	0	0	51		52		53		54		55	
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	21.000	0	0	21.001		21.002		21.003		21.004		21.005	
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	0	0	51		52		53		54		55	
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	29	0	0	30		31		32		33		34	
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100	0	0	101		102		103		104		105	
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	14	0	0	15		16		17		18		19	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	14	0	0	15		16		17		18		19	
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)				10		11		12		13		14	

	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	10	0	0	11		12		13		14		15	
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	5	0	0	6		7		8		9		10	
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	5	0	0	6		7		8		9		10	
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	300	0	0	301		302		303		304		305	
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	29	0	0	30		31		32		33		34	
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						0		6.835.500.000		7.177.275.000		7.536.138.750		7.912.945.687,5
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	21.000	0	0	21.001	0	21.002	6.835.500.000	21.003	7.177.275.000	21.004	7.536.138.750	21.005	7.912.945.687,5
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						0		180.192.600		189.202.230		198.662.341,5		208.595.458,58
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	14	14	6.720.000,00	15	0	16	180.192.600	17	189.202.230	18	198.662.341,5	19	208.595.458,58
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			14	2.290.350.000,00		2.290.350.000		2.525.110.875		2.651.366.418,75		2.783.934.739,69		2.923.131.476,67
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						0		1.323.000.000		1.389.150.000		1.458.607.500		1.531.537.875
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100	0	0	101	0	102	1.323.000.000	103	1.389.150.000	104	1.458.607.500	105	1.531.537.875
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku						0		55.125.000		57.881.250		60.775.312,5		63.814.078,13

Teks dan Non Teks Peserta Didik														
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	300	0	0	301	0	302	55.125.000	303	57.881.250	304	60.775.312,5	305	63.814.078,13
1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0		1.653.750.000		1.736.437.500		1.823.259.375		1.914.422.343,75
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10	10	38.500.000,00	11	0	12	1.653.750.000	13	1.736.437.500	14	1.823.259.375	15	1.914.422.343,75
1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru						0		826.875.000		868.218.750		911.629.687,5		957.211.171,88
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5	0	0	6	0	7	826.875.000	8	868.218.750	9	911.629.687,5	10	957.211.171,88
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah						0		937.125.000		983.981.250		1.033.180.312,5		1.084.839.328,13
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	29	0	0	30	0	31	937.125.000	32	983.981.250	33	1.033.180.312,5	34	1.084.839.328,13
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						269.500.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781,25
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	0	0	6	269.500.000	7	551.250.000	8	578.812.500	9	607.753.125	10	638.140.781,25
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						150.000.000		165.375.000		173.643.750		182.325.937,5		191.442.234,38
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	0	0	51	150.000.000	52	165.375.000	53	173.643.750	54	182.325.937,5	55	191.442.234,38
1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						0		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781,25
Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	0	0	6	0	7	551.250.000	8	578.812.500	9	607.753.125	10	638.140.781,25

1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						0		1.212.750.000		1.273.387.500		1.337.056.875		1.403.909.718,75
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	0	0	2	0	3	1.212.750.000	4	1.273.387.500	5	1.337.056.875	6	1.403.909.718,75
1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah						0		55.125.000		57.881.250		60.775.312,5		63.814.078,13
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	29	0	0	30	0	31	55.125.000	32	57.881.250	33	60.775.312,5	34	63.814.078,13
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						0		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156,25
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	3.579	0	0	3.580	0	3.581	110.250.000	3.582	115.762.500	3.583	121.550.625	3.584	127.628.156,25
1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium						0		826.875.000		868.218.750		911.629.687,5		957.211.171,88
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5	0	0	6	0	7	826.875.000	8	868.218.750	9	911.629.687,5	10	957.211.171,88
1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah						0		882.000.000		926.100.000		972.405.000		1.021.025.250
Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)		0	0	10	0	11	882.000.000	12	926.100.000	13	972.405.000	14	1.021.025.250
1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal						4.041.750.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781,25
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	5	0	0	6	4.041.750.000	7	551.250.000	8	578.812.500	9	607.753.125	10	638.140.781,25
1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0		826.875.000		868.218.750		911.629.687,5		957.211.171,88
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	5	0	0	6	0	7	826.875.000	8	868.218.750	9	911.629.687,5	10	957.211.171,88
1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781,25
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	5	0	0	6	0	7	551.250.000	8	578.812.500	9	607.753.125	10	638.140.781,25

Terehabilitasi	yang Telah Direhabilitasi (Ruang)													
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan						639.971.800		882.000.000		926.100.000		972.405.000		1.021.025.250
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	10	0	0	11	639.971.800	12	882.000.000	13	926.100.000	14	972.405.000	15	1.021.025.250
1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781,25
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	0	0	6	0	7	551.250.000	8	578.812.500	9	607.753.125	10	638.140.781,25
1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0		826.875.000		868.218.750		911.629.687,5		957.211.171,88
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5	0	0	6	0	7	826.875.000	8	868.218.750	9	911.629.687,5	10	957.211.171,88
1.01.02.2.04.0058 - Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat						0		330.750.000		347.287.500		364.651.875		382.884.468,75
Taman Bacaan Masyarakat yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	5	0	0	6	0	7	330.750.000	8	347.287.500	9	364.651.875	10	382.884.468,75
1.01.02.2.04.0059 - Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat						0		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781,25
Taman Bacaan Masyarakat yang Terbangun	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	5	0	0	6	0	7	551.250.000	8	578.812.500	9	607.753.125	10	638.140.781,25
1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781,25
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	0	0	6	0	7	551.250.000	8	578.812.500	9	607.753.125	10	638.140.781,25
1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						0		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781,25
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	0	0	6	0	7	551.250.000	8	578.812.500	9	607.753.125	10	638.140.781,25

1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						400.000.000		1.488.375.000		1.562.793.750		1.640.933.438		1.722.980.108,25
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Tendik pendidikan dasar dan menengah yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	80	0	0	82	400.000.000	83	1.488.375.000	84	1.562.793.750	85	1.640.933.438	86	1.722.980.108,25
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0		912.362.500		981.268.750		1.047.832.188		1.117.723.796,25
Persentase tenaga yang mengembangkan kurikulum SD dan SMP	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1	0	0	100	0	100	912.362.500	100	981.268.750	100	1.047.832.188	100	1.117.723.796,25
	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	1	0	0	3		4		5		6		7	
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	0	0	2		3		4		5		6	
	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	100	0	0	100		100		100		100		100	
	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1	0	0	2		3		4		5		6	
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	0	0	2		3		4		5		6	
1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156,25
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	0	0	2	0	3	110.250.000	4	115.762.500	5	121.550.625	6	127.628.156,25
1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0		200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1	0	0	100	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000

1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0		236.737.500		291.862.500		243.955.626		298.653.406
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	100	0	0	100	0	100	236.737.500	100	291.862.500	100	243.955.626	100	298.653.406
1.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	1	0	0	3	0	4	100.000.000	5	100.000.000	6	100.000.000	7	100.000.000
1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar						0		165.375.000		173.643.750		182.325.937		191.442.234
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1	0	0	2	0	3	165.375.000	4	173.643.750	5	182.325.937	6	191.442.234
1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	0	0	2	0	3	100.000.000	4	100.000.000	5	100.000.000	6	100.000.000
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						400.000.000		576.012.500		581.525.000		593.101.250		605.256.312
Persentase tenaga yang mengembangkan kurikulum PAUD dan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	1.000	0	0	1.000	400.000.000	1.000	576.012.500	1.000	581.525.000	1.000	593.101.250	1.000	605.256.312
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)													

	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	1	0	0	2		3		4		5		6	
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	0	0	2		3		4		5		6	
	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	2	0	0	2		3		4		5		6	
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0		0		0		0		0
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)		0	0		0		0		0		0		0
1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	1.000	0	0	1.000	100.000.000	1.000	150.000.000	1.000	150.000.000	1.000	150.000.000	1.000	150.000.000
1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	2	0	0	2	100.000.000	3	200.000.000	4	200.000.000	5	200.000.000	6	200.000.000

1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						100.000.000		115.762.500		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	1	0	0	2	100.000.000	3	115.762.500	4	115.762.500	5	121.550.625	6	127.628.156
1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						100.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	0	0	2	100.000.000	3	110.250.000	4	115.762.500	5	121.550.625	6	127.628.156
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						111.038.001.164		121.186.630.986		127.245.962.535		133.608.260.662		140.288.673.695
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Pemerataan Guru (%)	80	0	0	83	111.038.001.164	84	121.186.630.986	85	127.245.962.535	86	133.608.260.662	87	140.288.673.695
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	70	0	0	76		77		78		79		80	
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						111.038.001.164		121.186.630.986		127.245.962.535		133.608.260.662		140.288.673.695
Persentase tenaga pendidik dan kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkompentensi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	14	0	0	14	111.038.001.164	14	121.186.630.986	14	127.245.962.535	14	133.608.260.662	14	140.288.673.695
	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar,	2	2	360.044.600,00	2		2		2		2		2	

	PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)													
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1.175.643.800		1.023.071.049		1.074.224.601		1.127.935.831		1.184.332.623
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	2	2	360.044.600,00	2	1.175.643.800	2	1.023.071.049	2	1.074.224.601	2	1.127.935.831	2	1.184.332.623
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						109.862.357.364		120.163.559.937		126.171.737.934		132.480.324.831		139.104.341.072
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	14	14	103.711.350.400,00	14	109.862.357.364	14	120.163.559.937	14	126.171.737.934	14	132.480.324.831	14	139.104.341.072
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						148.567.700		275.625.000		289.406.250		303.876.562,5		319.070.390,65
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	60			62	148.567.700	63	275.625.000	64	289.406.250	65	303.876.562,5	66	319.070.390,65
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						0		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156,26
Persentase satuan pendidikan dasar yang diberikan rekomendasi perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	9	1	4.800.000,00	11	0	12	110.250.000	13	115.762.500	14	121.550.625	15	127.628.156,26

	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	9	0	0	11		12		13		14		15	
1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						0		55.125.000		57.881.250		60.775.312,5		63.814.078,13
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	9	1	4.800.000,00	11	0	12	55.125.000	13	57.881.250	14	60.775.312,5	15	63.814.078,13
1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						0		55.125.000		57.881.250		60.775.312,5		63.814.078,13
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	9	0	0	11	0	12	55.125.000	13	57.881.250	14	60.775.312,5	15	63.814.078,13
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						148.567.700		165.375.000		173.643.750		182.325.937,5		191.442.234,39
Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diberikan rekomendasi perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	9	1	4.800.000,00	11	148.567.700	12	165.375.000	13	173.643.750	14	182.325.937,5	15	191.442.234,39
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	9	0	0	11		12		13		14		15	

	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	9	1	25.000.000,00	11		12		13		14		15	
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						32.000.000		55.125.000		57.881.250		60.775.312,5		63.814.078,13
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	9	1	4.800.000,00	11	32.000.000	12	55.125.000	13	57.881.250	14	60.775.312,5	15	63.814.078,13
1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						66.567.700		55.125.000		57.881.250		60.775.312,5		63.814.078,13
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	9	0	0	11	66.567.700	12	55.125.000	13	57.881.250	14	60.775.312,5	15	63.814.078,13
1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						50.000.000		55.125.000		57.881.250		60.775.312,5		63.814.078,13
Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	9	1	25.000.000,00	11	50.000.000	12	55.125.000	13	57.881.250	14	60.775.312,5	15	63.814.078,13
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						0		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781
Meningkatnya kelestarian bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	50			52	0	53	551.250.000	54	578.812.500	55	607.753.125	56	638.140.781

1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						0		551.250.000		578.812.500		607.753.125		638.140.781
Persentase satuan pendidikan dasar yang melakukan pembinaan bahasa dan sastra	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media)	1	0	0	1	0	1	551.250.000	2	578.812.500	2	607.753.125	2	638.140.781
	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku)	1	0	0	2		2		3		3		3	
	Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul)	2	0	0	2		3		3		4		4	
	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)	1	0	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	1	0	0	2		2		2		3		3	
	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang)	1	0	0	1		2		2		3		3	
1.01.06.2.01.0004 - Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota						0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang)	1	0	0	1	0	2	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000
1.01.06.2.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000

Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)	1	0	0	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
1.01.06.2.01.0008 - Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah						0		201.250.000		178.812.500		182.753.125		163.140.781
Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku)	1	0	0	2	0	2	201.250.000	3	178.812.500	3	182.753.125	3	163.140.781
1.01.06.2.01.0010 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota						0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	1	0	0	2	0	2	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000
1.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi media publik berbahasa daerah						0		100.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000
Media publik berbahasa daerah terfasilitasi	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media)	1	0	0	1	0	1	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000
1.01.06.2.01.0012 - Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah						0		50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000
Penyusunan Penerjemahan cerita rakyat daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul)	2	0	0	2	0	3	50.000.000	3	50.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000
Persentase satuan pendidikan dasar yang melakukan perlindungan bahasa dan sastra						0		0		0		0		0

Tabel 4.4 Daftar subkegiatan Prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah

No. (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
1	Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran	Meningkatnya kualitas pendidikan dan akses terhadap pendidikan menghapus kesenjangan untuk memperoleh pendidikan, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing di pasar kerja, dengan mendapatkan keterampilan melalui pendidikan, membuka peluang kerja yang lebih baik, berdampak pada pengurangan angka kemiskinan serta pengangguran.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	

			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Penyediaan infrastruktur TIK	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Penataan Ruang/Sudut Baca	
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	

			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pengadaan Mebel Sekolah	
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	

			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	o
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Penataan Ruang/Sudut Baca	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	

			Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			Penyediaan infrastruktur TIK	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			Pengadaan Mebel PAUD	
			Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	

			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			Penyediaan infrastruktur TIK	
			Penataan Ruang/Sudut Baca	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Penyediaan infrastruktur TIK	
			Penataan Ruang/Sudut Baca	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	

			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Pembangunan Ruang Laboratorium	
			Pengadaan Mebel Sekolah	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
			Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	
			Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	

			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	
			Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	

			Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	
			Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal	
2	Peningkatan Insentif / Tunjangan kepada guru ngaji, guru madin, guru PAUD/TK/RA/swasta, honorer PTT/GTT/non ASN, peningkatan kesejahteraan nakes ASN, perangkat desa, BPD/RT/RW/ Linmas/Kader Posyandu/Kader Lansia, Lembaga Sosial / Keagamaan / Kemasyarakatan / Kemahasiswaan / Kepemudaan / Organisasi Buruh	Meningkatnya kesejahteraan guru, mendorong peningkatan kualitas guru, dan pada mutu pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
3	Peningkatan Infrastruktur	Meningkatnya akses terhadap pendidikan hingga peningkatan kualitas pembelajaran dan lingkungan belajar, menciptakan lingkungan yang menarik dan inspiratif, seperti ruang belajar yang nyaman, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			Pengadaan Mebel Sekolah	
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			Pembangunan Laboratorium	
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
			Pembangunan Asrama Sekolah	
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Pembangunan Kantin Sekolah	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	

			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
4	20.000 Beasiswa Kuliah Gratis	Membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan, terutama bagi pelajar kurang mampu dan siswa berprestasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
5	Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya layanan yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan pendidikan.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	
			Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
			Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	

			Pengadaan Aset Tak Berwujud	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.5. Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN									
2.	Indeks pendidikan	Indeks	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,5	13,72	13,86	13,99	14,15	14,27	14,37	
4.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	6,93	6,96	7,03	7,11	7,24	7,3	7,31	

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
2.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	positif	%	97,64	97,84	98,04	98,24	98,44	98,64	98,84	
3.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional		Nilai	59,86	60,06	60,26	60,46	60,66	60,86	61,06	
4.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	positif	%	84,96	85	86	87	88	89	90	
5.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		Nilai	66,93	67,03	67,13	67,23	67,33	67,43	67,53	
6.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	61,3	61,4	61,5	61,6	61,7	61,8	61,9	
7.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	positif	Nilai	50,6	50,8	51	51,2	51,4	51,6	51,8	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Selain itu Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember merupakan hasil kajian dan analisis terhadap isu strategis di bidang pendidikan, potensi daerah, serta permasalahan yang mempengaruhi layanan pendidikan. Rencana strategis lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029 sebagai alat pendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pendidikan Kabupaten Jember secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi-misi Pembangunan Kabupaten Jember melalui peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia dan pemerataan layanan pendidikan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029 mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu dalam peningkatan Indeks Pendidikan, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah. Dengan mengimplementasikan program-program yang telah disusun, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember bersama Pemerintah Daerah optimis dapat mencapai target Indeks Pendidikan sebesar 0,65, Harapan Lama Sekolah sebesar 14,37, dan Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,31 tahun pada akhir periode. Pencapaian indikator tersebut didukung dengan adanya Indikator Kinerja Kunci yang secara kompleks dan komprehensif mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama.

5.1 Kesimpulan Substansial

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Jember adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya bersama untuk membangun daerah dan bangsa secara menyeluruh. Menyelaraskan tujuan pembangunan bidang pendidikan sektor infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perencanaan program pendidikan yang tepat sasaran. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat mengukur nilai pencapaian pembangunan pendidikan yang adil dan merata dalam kurun waktu berjalan. Salah satu hal pembangunan bidang pendidikan berdasarkan isu strategis sebelumnya yaitu:

1. Program – program keaksaraan fungsional untuk meningkatkan **Angka Melek Huruf** yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta pelatihan keterampilan berbasis literasi. Hal tersebut selaras dengan program subkegiatan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran. Angka Melek Huruf yang meningkat diharapkan memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
2. **Angka Partisipasi Kasar (APK)** dan **Angkat Partisipasi Murni (APM)** di jenjang pendidikan tertentu berpengaruh pada faktor ekonomi serta persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memfasilitasi bantuan biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Melakukan sosialisasi massif tentang pentingnya pendidikan wajib 12 tahun kepada orang tua dan masyarakat.
3. **Angka Rata – Rata lama sekolah** mencerminkan tingkat pendidikan formal yang belum memadai. Pendidik hanya mampu menempuh pendidikan pada jenjang tertentu, sehingga tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan Pemerintah Daerah menyediakan biaya bantuan pendidikan yang tepat sasaran, jelas paket yang fleksibel dan mudah diakses. Meningkatkan Angka Rata- Rata lama sekolah. Keterampilan yang diperoleh sebagai bekal pengembangan diri di dunia industri.
4. **Aksesibilitas, Sarana dan Prasarana infrastruktur Pendidikan** di Wilayah Kabupaten Jember memiliki keunikan secara geografis. Kondisi geografis yang beragam seperti pegunungan dan medan yang sulit diakses sangat mempengaruhi kemudahan siswa untuk mencapai sekolah. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti bangunan, peralatan belajar, perpustakaan, laboratorium, dan belum tercukupinya akses internet. Hal tersebut dapat berpengaruh pada penurunan kualitas pembelajaran dan penggalan potensi siswa. Pemerintah Daerah berupaya melakukan pembangunan infrastruktur yang merata melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) program pemerintah pusat.
5. **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan** diterima setiap peserta didik secara minimal melalui mutu pelayanan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan Pemerintah Daerah. Penjaminan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan publik pendidikan melalui digitalisasi pelayanan administrasi,

izin pelaksanaan pendidikan yang mudah dan akunabel. Selain itu, pelayanan pendidikan minimal memastikan pemerataan kualitas tenaga kependidikan dan akses layanan pendidikan secara merata bagi peserta didik.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program – program pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menerapkan sejumlah kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman utama agar setiap program dan kegiatan berjalan terarah, akuntabel, dan berorientasi pada tujuan serta hasil yang maksimal. Kaidah berikut dirancang untuk mendukung seluruh proses pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Jember dan 30 Program Pendidikan untuk Masa Depan Jember. Selain itu Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, melakukan pendekatan analisis yang subjektif untuk menjawab tantangan strategis dan kebutuhan bidang pendidikan masyarakat Kabupaten Jember secara berkelanjutan.

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Semua tahapan pembangunan pendidikan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga implementasi program, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini dapat dicapai melalui pelaporan yang jelas dan evaluasi yang terukur untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran.

2. Partisipasi Aktif Masyarakat

Penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, siswa, dan masyarakat umum. Keterlibatan ini penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga pendidikan dapat menjadi milik bersama.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Pengelolaan sumber daya, baik itu anggaran, tenaga pendidik, maupun fasilitas sekolah, perlu dioptimalkan untuk menghasilkan dampak maksimal pada peningkatan kualitas pendidikan. Tujuannya adalah memastikan setiap investasi memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan mutu belajar dan pemerataan akses.

4. Keadilan Sosial

Pembangunan pendidikan harus bersifat inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus, dan anak-anak yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau karena akses yang jauh dari sarana prasarana pendidikan.

5. Berkelanjutan

Setiap program dan kegiatan pendidikan harus dirancang dengan visi jangka panjang. Hal ini mencakup keberlanjutan lingkungan belajar, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, dan kesiapan sistem pendidikan dalam menghadapi perubahan zaman serta kemajuan teknologi.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dapat membangun sistem pendidikan yang kuat dan adaptif, yang pada akhirnya akan menciptakan generasi muda yang unggul dan siap bersaing di masa depan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi adalah langkah penting untuk memastikan setiap program pembangunan pendidikan di Kabupaten Jember berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang nyata. Berikut adalah rangkuman mekanisme yang bisa diterapkan:

1. Monitoring dan Pengawasan Rutin

Pelaksanaan secara rutin dan terjadwal oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember beserta Pemerintah Daerah untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi fisik, keuangan, dan ketercapaian sasaran di lapangan. Monitoring tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk menjaga program pelaksanaan tetap berada pada fokus utama tujuan.

2. Evaluasi Kinerja Tahunan

Pencapaian indikator kinerja utama dan kunci dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas strategi serta menyusun rekomendasi perbaikan program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Hal tersebut sangat membantu program pendidikan agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Jember.

3. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Forum – forum musyawarah pendidikan, penilaian pelayanan pendidikan melalui survei kepuasan layanan berfungsi sebagai umpan balik atas penerapan implementasi kebijakan/progam pendidikan. Hal tersebut dapat memicu peningkatan transparansi pelayanan dan memastikan kebijakan pendidikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

4. Audit Internal dan Eksternal

Program/kebijakan pendidikan selaras dengan kepatahuan terhadap regulasi yang sedang dijalankan. Terkait hal tersebut yakni efektivitas penggunaan anggaran, penyimpangan perilaku dapat mengganggu program/kebijakan layanan pendidikan yang sedang dijalankan. Pengawasan, dilakukan oleh Inspektorat Daerah ataupun lembaga pemeriksa lainnya hingga masyarakat umum guna memastikan program dapat berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Mengacu pada substansi isu strategis, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berupaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan demi menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. Hadi Mulyono, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661107 198809 1 001